

RANCANG BANGUN APLIKASI MULTIMEDIA MENGGUNAKAN MACROMEDIA DIRECTOR MX 2004 UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Unang Achlison

*Teknik Elektronika, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer
Jl. Majapahit 605 Semarang, Indonesia*

Email: unang@stekom.ac.id

ABSTRAK

Setelah dilakukan penelitian pada KB dan TK Anak Cerdas di Kota Ungaran, diketahui ada kendala yang dimiliki oleh guru pengajar TK B dalam menyampaikan materi. Kendala yang dihadapi adalah anak-anak mudah jenuh dengan cara belajar konvensional yang digunakan guru ditambah belum adanya media pembelajaran di sekolah tersebut. Antisipasi kendala tersebut dengan menggunakan media pembelajaran yang mampu meningkatkan minat belajar anak dan dapat menghilangkan kejenuhan dari pembelajaran konvensional.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara dan manfaat dari Macromedia Director MX 2004 dalam dunia pendidikan. Metode yang dipakai metode Research and Development (penelitian dan pengembangan), diawali dari (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain media pembelajaran, (4) validasi media pembelajaran, (5) revisi media pembelajaran, (6) uji coba media pembelajaran, dan (7) penerapan.

Materi pembelajaran menampilkan lima materi yang disertai lima soal dalam setiap materi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah layak dan memenuhi syarat untuk digunakan. Hal ini sesuai dengan validasi dari hasil uji coba terhadap 14 siswa di kelas Eagle dan Hawk, hasil menunjukkan bahwa siswa mampu memberikan jawaban 91,4% benar.

Kata kunci : *Aplikasi Multimedia, Macromedia Director MX 2004, PAUD.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat

dalam memberikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan

melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Masa usia dini adalah masa emas perkembangan anak dimana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah distimulasi. Periode emas ini hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pengembangan menyeluruh yang melibatkan aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14, upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia nol hingga enam tahun tersebut dilakukan melalui Pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk taman kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan keluarga balita.

Kelompok bermain dan TK Anak Cerdas adalah salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di kota Ungaran, tepatnya di Jl. Diponegoro No.250 Ungaran. Hasil survey yang telah dilakukan penulis, Kelompok Bermain dan TK Anak

Cerdas terdiri dari beberapa kelompok, untuk KB atau Kelompok Belajar terdiri dari kelas Chili, Carrot, Orange dan Apple. Sedangkan untuk kelas TK A terdiri dari kelas Lion dan Tiger dan untuk TK B terdiri dari Hawk dan Eagle. Proses belajar – mengajar untuk anak usia lima hingga enam tahun atau TK B masih sering dengan cara konvensional atau manual. Dimana guru memberikan pelajaran dengan cara menunjukkan gambar-gambar kertas berbentuk gambar hewan, buah, benda, angka dan lain sebagainya (*print out*) serta menjelaskan kepada anak satu persatu nama benda atau angka yang ada di gambar. Pembelajaran seperti ini dinilai kurang optimal, karena ada beberapa anak merasa jenuh saat mengikuti proses belajar. Selain itu tersedianya komputer yang berada di TK Anak Cerdas perlu dioptimalkan lagi dalam penggunaannya untuk menyajikan media pembelajaran agar meningkatkan minat belajar siswa.

Media pembelajaran multimedia dengan tampilan menggunakan komputer akan memberikan kesan beda dengan pembelajaran secara konvensional, tidak hanya mengurangi kejenuhan, anak-anak akan lebih senang belajar.

TK Anak Cerdas memiliki komputer dan LCD namun Pengajar memiliki keterbatasan kemampuan dalam pembuatan media pembelajaran sehingga menjadi kendala dalam mengajar dengan komputer. Karena terbatasnya materi yang diajarkan tidak memungkinkan apabila harus mengenalkan anak dengan materi yang sama melalui print out kertas. Pengulangan materi pastinya akan membuat anak kurang

tertarik untuk belajar. Oleh karena itu perlu dibuat media pembelajaran baru yang berisikan lebih dari satu materi agar dapat menjadi bahan ajar guru sehingga proses belajar dengan komputer bisa berjalan lancar dan dapat mengurangi kejenuhan siswa serta mampu meningkatkan minat belajar.

Manfaat penggunaan komputer adalah membantu pekerjaan (Kusnadi, 2008). Karena keperluan manusia sangat beragam maka komputer dirancang untuk membantu berbagai macam aktivitas manusia. Untuk mencapai tujuan ini maka komponen perangkat lunak lainnya harus ada yaitu program aplikasi. Aplikasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk kepentingan khusus (Abdul Kadir, 2009).

Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar gerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi (M. Suyanto, 2003). Yudhi Munadi (2008) menjelaskan bahwa Multimedia adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang memberikan pengalaman secara langsung bisa melalui computer dan internet, bisa juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat.

Macromedia Director MX 2004 merupakan sebuah program untuk membantu pembuatan animasi atau multimedia yang interaktif. Macromedia Director MX 2004

memiliki fasilitas pengaturan untuk membuat suatu animasi per *frame* dan animasi tiga dimensi. Macromedia Director MX 2004 memiliki 5 jendela dasar yang sering digunakan. Kelima jendela tersebut adalah *Stage*, *Score*, *Cast Member*, *guide* dan *grid*.

Adobe Photoshop CS3 merupakan program yang berguna dalam proses retouching/manipulasi foto/gambar. Objek yang diolah dalam Adobe Photoshop CS3 dianggap kumpulan pixel/titik dengan kerapatan warna tertentu. Tetapi Adobe Photoshop CS3 juga dapat membuat garis, huruf dan semua objek yang dapat diolah program pengolahan vektor.

Corel Draw adalah program komputer untuk melakukan editing pada garis vector. Kegunaan Corel Draw adalah sebagai alat untuk pengolahan gambar, maka program ini sering digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang publikasi atau percetakan maupun bidang yang lain yang butuh proses visualisasi. Tampilan kerja CorelDraw X4 terdiri atas beberapa bagian penting.

Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana membuat pembelajaran multimedia yang menarik perhatian untuk meningkatkan daya ingat anak di TKB Semester 1

Tujuan penelitian yaitu membuat pembelajaran multimedia untuk anak di TKB Semester 1 menggunakan Macromedia Director MX2004.

METODE PENELITIAN

Metode Pengembangan

Menurut Borg & Gall (1983), ada 10 langkah penggunaan metode *Research and Development* (R&D) yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produk masal. Hasil penelitian ini tidak diproduksi secara masal dan hanya diujikan secara terbatas karena penelitian ini hanya menggunakan sampel dari sebagian populasi yang ada sehingga data penelitian yang diperoleh valid. Oleh sebab itu penelitian ini hanya menggunakan tujuh tahap (Sugiyono, 2009: 409) yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain media pembelajaran, (4) validasi media pembelajaran, (5) revisi media pembelajaran, (6) uji coba media pembelajaran, dan (7) penerapan.

Prosedur pengembangan

a. Potensi dan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Proses belajar dengan cara menunjukkan gambar-gambar kertas berbentuk gambar hewan, buah, benda, angka dan lain sebagainya (*print out*) serta menjelaskan kepada anak satu persatu nama benda atau angka yang ada di gambar (konvensional) menimbulkan kejenuhan pada anak-anak.

- 2) Kurang dioptimalkan penggunaan komputer dalam proses belajar – mengajar.
- 3) Perlunya media pembelajaran baru yang mampu meningkatkan minat belajar anak-anak dan mengurangi kejenuhan
- 4) Pengumpulan Data
- 5) Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara observasi dan melalui study literatur. Observasi merupakan kegiatan penelitian pendahuluan untuk mengumpulkan data awal yang dijadikan dasar pengembangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan suatu produk berupa Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) dengan menggunakan Macromedia Director MX 2004 pada materi Ukuran, Warna, Bilangan, Bentuk geometri, hewan dan nama benda untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

Hasil Pengembangan

a. Potensi dan Masalah

- 1) Proses belajar secara konvensional atau manual yang diberikan oleh pengajar dapat menimbulkan kejenuhan pada anak-anak.
- 2) Kurang dioptimalkan penggunaan komputer dan LCD sebagai sarana dalam proses belajar – mengajar.
- 3) Perlunya media pembelajaran yang mampu meningkatkan minat belajar

anak-anak dan mengurangi kejenuhan.

b. Pengumpulan Data

1) Program Semester

Data yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan menjadi bahan acuan dalam membuat media pembelajaran, di antaranya data mengenai Program semester dan data siswa.

2) Data Siswa

Data lain dari hasil survey yang diperoleh penulis adalah data siswa. Siswa di Kelompok TK B di lembaga pendidikan KB dan TK Anak Cerdas dikelompokkan menjadi dua kelas yaitu Eagle dan Hawk.

c. Desain Media Pembelajaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan produk media pembelajaran Belajar Bilangan dan Huruf. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : pertama membuat *story board*, kemudian membuat *Layout* dan Ketiga pengembangan draft yang telah dibuat tangan dan dengan menggambar ulang dengan komputer melalui *Adobe Photoshop CS3* dan *CorelDRAW X5* dikembangkan lagi menjadi media pembelajaran dengan *Macromedia Director MX 2004*.

- 1) Penyusunan kerangka dalam multimedia
- 2) Penentuan sistematika penyajian materi

Sistematika penyajian materi dalam media pembelajaran ini sesuai dengan PROSEM TK B semester 1 minggu 9-17.

Penyajian Materi

1) Pembuatan Produk

a) Diagram Alir

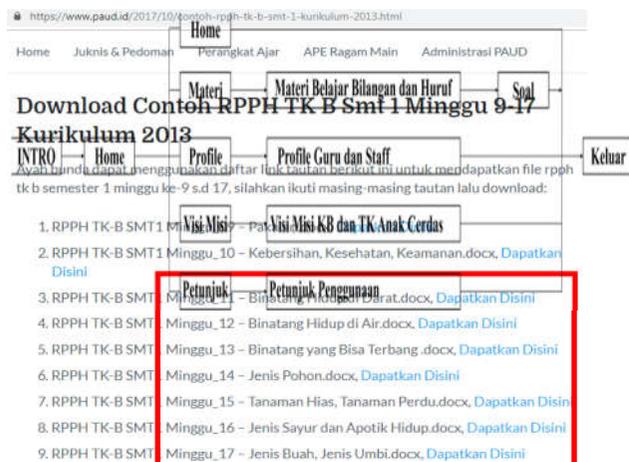


Diagram Alir

b) Pembuatan Multimedia/ Implementasi Program

Implementasi program adalah tahap menerjemahkan desain ke tampilan sebenarnya menggunakan *Macromedia Director MX 2004*. Tampilan Multimedia sebagai berikut:



Halaman Materi



Halaman Materi Bentuk



Halaman Materi Ukuran

Halaman Materi Warna



Halaman Materi Hewan

Halaman Materi Nama Benda



Halaman Materi Bilangan

Uji Coba Produk

Hasil Uji Coba

Uji coba dilakukan untuk mengetahui hasil dari pencapaian media pembelajaran multimedia (Arikunto, 2006). Media

pembelajaran multimedia diperuntukkan kelompok TK B usia lima hingga enam tahun, yaitu 14 siswa di kelas Eagle dan Hawk.

Hasil uji coba dengan skala Likert (Sugiyono, 2013:132) dan menggunakan skala penilaian: 1=sangat salah; 2=salah; 3=benar; 4=sangat benar; 5=tepat sekali. Hasil uji coba produk ditampilkan pada tabel tersebut diatas.

Materi pembelajaran menampilkan lima materi yang disertai lima soal dalam setiap

No.	Nama	Uk	War	Bila	Bent	Hew	Be nd a	%
1.	Alif	5	5	5	4	5	5	96,6%
2.	Hama m	4	5	4	5	5	5	93,3%
3.	Bhism a	4	4	5	5	5	5	93,3%
4.	Hanif	4	4	4	5	5	5	90%
5.	Nizam	4	4	5	4	5	5	90%
6.	Rafka	4	5	3	5	4	5	86,6%
7.	Ahnaf	5	3	4	5	4	5	86,6%
8.	Yusuf	4	5	5	4	3	4	83,3%
9.	Ata	5	5	5	4	5	5	96,6%
10.	Lia	5	5	3	5	4	5	90%
11.	Kamil a	5	4	5	4	3	5	86,6%
12.	Aini	5	5	4	5	5	5	96,6%
13.	Zhafir a	5	4	5	4	5	4	81%
14.	Naem a	5	4	3	5	5	4	86,6%
	Jumlah	68	62	60	64	63	67	91,4%

materi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah layak dan memenuhi syarat untuk digunakan. Hal ini sesuai dengan validasi dari hasil uji coba terhadap 14 siswa di kelas Eagle dan Hawk, hasil menunjukkan bahwa siswa mampu memberikan jawaban 91,4% benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai hasil pembahasan mengenai “Rancang bangun aplikasi Multimedia menggunakan Macromedia Director MX 2004 untuk Pendidikan Anak Usia Dini” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dengan media pembelajaran “ Belajar Bilangan dan Huruf” memberikan suasana baru dalam proses belajar mengajar, dan juga pengoptimalan waktu dan melatih kemandirian anak-anak.
- b. Desain yang dibuat semenarik mungkin serta audio dalam media pembelajaran menjadikan anak-anak lebih semangat lagi saat belajar, sehingga tercapai tujuannya yaitu mengirangi kejenuhan saat belajar.
- c. Materi yang diangkat dalam media pembelajaran yang mana telah disesuaikan dengan PROSEM TK B membuat media pembelajaran sebagai motivasi bagi guru pengajar untuk lebih mengembangkan kreatifitas membuat cara belajar menjadi baik.

Keterbatasan Produk

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan sebagai berikut:

- a. Produk ditujukan untuk anak kelompok belajar TK B di KB dan TK Anak Cerdas Ungaran.
- b. Materi yang dimuat mengenai materi ukuran, materi warna, materi bilangan, materi bentuk geometri, materi hewan dan nama benda.

Saran

- a. Bagi guru di KB dan TK Anak Cerdas disarankan lebih kreatif lagi dalam membuat proses belajar lebih menarik yaitu dengan media pembelajaran.
- b. Pengembangan media pembelajaran yang lebih lanjut perlu ditambahkan lagi animasi-animasi baik teks, gambar maupun video yang lebih menarik, disesuaikan dengan tampilan dan materi.
- c. Pada pengembangan selanjutnya disarankan memperhatikan komposisi warna sesuai color harmony, agar tampilan dari media pembelajaran lebih menarik.

Kompetensi TK dan RA. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offest,

Munadi, Yudhi. 2008. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Gaung Persada. Hal. 57.

M. Suyanto. 2003. *Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing*. Yogyakarta: Andi. Hal. 20-21.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.16.

Borg & Gall. 1983. *Educational Research*. New York: Longman. Brophy, J.

Depdiknas. 2005. *Kurikulum 2004 Standar*

FASILITASI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG

Tri Nurhayati¹, Anas Sa'bani², Adhi Budi Susilo³

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Kota Semarang 50185

²Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Kota Semarang 50232

³Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo
Jl. Diponegoro N0.186 Ungaran 50513

Email: trinurhayati.wali9@gmail.com¹, anas.peradi@gmail.com²,
adhibudisusilosh@gmail.com³

ABSTRAK

Penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang mencapai jumlah 4141 orang. Mereka banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun dalam mengakses informasi, yang selanjutnya akan menghambat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel masih jauh dari harapan sehingga mereka kehilangan hak untuk mendapatkan kemandirian ekonomi yang setara dengan masyarakat pada umumnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Spesifikasi deskriptif analitis dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif sosiologis dengan didasarkan pada kedalaman data yang akan dihimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap semua permasalahan dalam penelitian ini.

Kabupaten Semarang memerlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan Provinsi belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kemandirian ekonomi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Semarang.

Kata Kunci : Hak, Kemandirian ekonomi, Penyandang Disabilitas, Kabupaten Semarang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat

Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat. Istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak konstitusionalnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya.² Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang sejumlah 576 orang penyandang disabilitas.³ Pada tahun 2019 sebanyak 4 (Empat) orang penyandang disabilitas memenuhi syarat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sejumlah formasi CPNS tahun 2018 yang diterima

Kabupaten Semarang adalah 364 formasi.⁴ Dalam praktik, ketentuan tersebut tidak berjalan lancar. Penyandang disabilitas sering terpinggirkan karena keadaan fisik dan mental. Posisinya yang memiliki kebutuhan berbeda, harus mendapat perhatian dari semua institusi pemerintah, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Pemerintah dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Semarang adalah suatu lembaga yang keberadaannya sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam pembahasan ini akan diketahui jawaban tentang peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah cukup berperan memberikan bantuan kepada Penyandang disabilitas berdasarkan program bantuan serta serta bimbingan keterampilan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Saat ini Implementasi undang-undang tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dilaksanakan melalui Dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.

¹ Pasal 42 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Pasal 53 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³ "rekap data penyandang disabilitas per kabupaten tahun 2016" dalam

<http://data.jatengprov.go.id> diakses Tanggal 28 April 2019

⁴ "empat penyandang disabilitas jadi cpns kabupaten semarang" dalam <http://www.semarangkab.go.id> diakses tanggal 28 April 2019

Data Disabilitas Kabupaten Semarang Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	AMBARAWA	118
2	BANCAK	111
3	BANDUNGAN	205
4	BANYUBIRU	272
5	BAWEN	171
6	BERGAS	315
7	BRINGIN	366
8	GETASAN	134
9	JAMBU	239
10	KALIWUNGU	229
11	PABELAN	346
12	PRINGAPUS	219
13	SUMOWONO	138
14	SURUH	175
15	SUSUKAN	154
16	TENGARAN	183
17	TUNTANG	267
18	UNGERAN BARAT	261
19	UNGERAN TIMUR	238
	JUMLAH	4141

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, oleh karena itu pada dasarnya Kabupaten Semarang juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam melaksanakan hak asasi manusia.

Berdasarkan situasi tersebut, Kabupaten Semarang perlu berperan dan turut serta memikul tanggung jawab pemerintah pusat dalam melaksanakan kewajiban Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak kemandirian ekonomi Penyandang Disabilitas daerah Kabupaten Semarang dengan menerbitkan suatu regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang urgen dikemukakan dalam Rumusan ini adalah?

1. Bagaimana dasar yuridis perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memfasilitasi pemenuhan hak kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Semarang

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menguraikan dasar yuridis perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang.
2. Menjelaskan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memfasilitasi pemenuhan hak kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Semarang.

Kegunaan dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat luas, disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai aturan hukum terkait pengaturan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas daerah Kabupaten Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Difabel atau kata yang memiliki definisi “*Different Abled People*” ini adalah sebutan bagi orang cacat. Kata tersebut muncul melalui proses diskusi dan juga pergulatan pemikiran yang cukup panjang. Di Yogyakarta istilah tersebut pada mulanya dimunculkan oleh almarhum Mansour Fakih. Mansour Fakih adalah orang pertama yang mengusulkan kata difabel tersebut dalam diskusinya bersama Setia Adi Purwanta seorang aktivis gerakan difabel dari Yogyakarta pada tahun 1997 an. Kata cacat yang selama ini umum digunakan tidak layak dilekatkan kepada manusia, karena kata tersebut seringkali juga digunakan pada benda yang rusak. Melalui kata difabel ini Mansour Fakih mencoba untuk meletakkan para penyandang cacat pada posisinya sebagai manusia. Sehingga kata difabel diyakininya lebih humanis dari pada kata penyandang cacat. Sejak diperkenalkan pada tahun 1998, kini kata difabel telah banyak digunakan oleh masyarakat dan juga media massa baik koran maupun televisi⁵

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai pengganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya undang-undang pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

⁵ Agnes Dwi Jayani, “Konstruksi *Different Abled People* (Difabel) Studi Terkait Pandangan Mahasiswa Difabel di Universitas Gajah Mada”, Universitas Gajah Mada 2014 hal.2.

Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Sebelumnya istilah penyandang cacat digunakan dalam berbagai dokumen kenegaraan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Istilah penyandang cacat adalah salah satu istilah yang digunakan pemerintah dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa istilah yang digunakan pemerintah pun mengalami perkembangan walaupun tetap saja masih memperlihatkan pandangan yang “merendahkan” bagi orang yang disebut. Istilah lain yang pernah digunakan dan sebagian masih digunakan sampai saat ini antara lain: penderita cacat (Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 1980), anak yang mempunyai masalah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988), penyandang masalah kesejahteraan sosial (Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Sosial Tahun 1984), dan penyandang kelainan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991)⁶.

Permasalahan penyandang disabilitas timbul karena adanya hambatan untuk melakukan interaksi dalam aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hambatan

⁶ “Aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas” dalam //lingkarsosial.wordpress.com. di akses pada 26 April 2019.

tersebut bisa datang dari dalam diri difabel sendiri atau dari luar diri difabel, atau bisa datang dari ke duanya. Untuk memecahkan pokok permasalahan tersebut diperlukan pendekatan dasar sebagai langkah fasilitasi hak-hak kemandirian ekonomi mereka diantaranya adalah dengan memberdayakan mereka (*capacity and character building*) dan membuat sebuah model advokasi (kebijakan) yang mampu mengawal mereka untuk mewujudkan tujuan bersama dan tujuan negara untuk melindungi warganya serta menyediakan infrastruktur yang memadai sebagai aksesibilitas terhadap fasilitas umum sehingga nantinya penyandang disabilitas tidak lagi sebagai objek, tetapi dijadikan subjek dalam pembangunan⁷.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.⁸ Dinyatakan pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁹

Termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang

mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.¹⁰ Infrastruktur tersebut meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer¹¹. Sedangkan spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua kegiatan penelaahan data yaitu penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif sosiologis dengan didasarkan pada kedalaman data yang akan dihimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap semua permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

¹⁰ Pasal 97 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 9.

⁷ Katarina Tomasevski, *Hak atas Kesehatan (terjemahan) dalam Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Ikdhal Kasim, Johannes da Masenus Arus (ed), Jakarta: Elsam, 2001, hal. 43.

⁸ Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang

Dasar Yuridis Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang

Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup difabel yang didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan, secara umum sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang-undangan di pusat.

Konstitusi menjamin adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹² Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa negara tidak memandang dan tidak membedakan antara masyarakat umum dengan kelompok yang menyandang disabilitas semua mendapatkan perlakuan yang sama, walaupun realitanya penyandang disabilitas masih kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Misalnya terbatasnya ruang publik, pelayanan publik, transportasi umum, pekerjaan pendidikan yang itu merupakan PR bersama antara pemerintah dan masyarakat luas untuk memperlakukan para penyandang disabilitas secara sama¹³.

Kebijakan pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan mendorong pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Undang-undang No 19

Tahun 2011 tentang CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Semarang berusaha memenuhi kebutuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, yang meliputi:

- a. Pendidikan, dalam memenuhi kebutuhan dan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
- b. Kesehatan, dalam memenuhi kebutuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.

¹² Lihat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Pipih Sopiah. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia, 2010, hal. 6.

- c. Hak administrasi kependudukan, dalam memenuhi hak administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan cara memasukkan penyandang disabilitas dalam Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, dsb.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas adalah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas-dinas setempat seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait. Dilain hal perlu adanya Peraturan Daerah tentang Disabilitas untuk menjadi payung hukum pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah.

Peran Pemerintah Kabupaten Semarang Dalam Memfasilitasi Pemenuhan Hak Kemandirian Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Semarang

Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat difabel (*different ability*) atau sering disebut dengan “orang yang memiliki kemampuan berbeda” harus berdasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan), kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan terutama yang berkenaan dengan masalah aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan. Saat ini masih terdapat banyak hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat memenuhi hak kemandirian

ekonomi seperti masyarakat lain pada umumnya.

Beberapa contoh hambatan arsitektural adalah tidak adanya trotoar, permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan yang tinggi, lubang pintu yang terlalu sempit, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya tempat parkir yang sesuai, tidak tersedia lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, telepon umum yang terlalu tinggi, tangga yang tidak berpagar pengaman, jendela atau papan reklame yang menghalangi jalan, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut di atas menjadi masalah bagi difabel dari jenis dan derajat kecacatan tertentu sehingga mereka tidak dapat merealisasikan kesamaan haknya sebagai warga masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah setempat harus menyediakan fasilitas pelayanan berupa sarana dan prasarana yang aksesable. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima¹⁴.

Sebagaimana dikutip media Suara Merdeka fasilitas publik di Kabupaten Semarang belum semuanya ramah difabel. bangunan kantor desa dan kantor kecamatan yang rata-rata masih belum pro terhadap komunitas ini.¹⁵ Melihat kondisi yang ada saat ini, di kabupaten Semarang masih banyak pula difabel yang belum bisa mengakses jaminan kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan, maka adanya

¹⁴ Lijan Poltak Sinambela, dan kawan-kawan. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.hal 7.

¹⁵ “Kantor Bupati Semarang Belum Ramah Difabel”, Selasa 5 Juni 2018 dalam www.suaramerdeka.com diakses tanggal 28 April 2019

kesepakatan atau pemahaman bersama, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak-hak difabel, agar terciptanya masyarakat yang inklusi bagi difabel, kesetaraan, terbukanya aksesibilitas, masyarakat yang non diskriminasi terhadap difabel dan kemandirian bagi difabel itu sendiri.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Sosial, masih banyak kaum disabilitas yang sebagian besar terdapat di pedesaan salah satunya adalah Kecamatan Suruh dengan jumlah \pm 175 orang kaum disabilitas yang produktif. Maka dari data diatas perlu adanya perwujudan langkah-langkah nyata untuk memberi bekal kepada kaum disabilitas agar berjiwa mandiri, serta memperkaya kompetensi produksi yang dimiliki melalui kegiatan pemberdayaan kaum disabilitas dengan pemanfaatan pengolahan limbah pasltik sebagai bekal kewirausahaan. Diharapkan warga Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang mampu berperan serta sebagai manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif serta berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan.

Pemerintahan dan masyarakat menjadi dua faktor utama dalam penciptaan aksesibilitas bagi difabel. Berdasarkan fakta yang ada, secara umum beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kepedulian aparat pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus diakibatkan adanya persepsi aparat pemerintah yang tidak benar terhadap keberadaan

masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus¹⁶.

Aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, paling tidak harus dapat mengamankan dan menjamin terimplementasikannya berbagai peraturan perundangan yang memungkinkan pemberian pelayanan khusus terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus tersebut secara adil. Disamping itu, aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat, juga harus dapat memberikan contoh yang baik dalam menyikapi pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat yang memang memerlukan atau membutuhkan pelayanan khusus tersebut.

Kualitas kebijakan, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran dan kondisi lingkungan merupakan faktor penentu suatu kebijakan¹⁷. Beberapa kondisi aparat pemerintah tersebut mengindikasikan adanya masalah yang menyebabkan kurang berjalannya pelayanan khusus dan aksesibilitas terhadap pelayanan dengan kebutuhan khusus itu, diantaranya adalah:

- 1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman para birokrat pengelola bangunan gedung mengenai acuan aksesibilitas dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus.

¹⁶ Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media, 2001, hal. 17.

¹⁷ Purwo Santoso. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2010. hal. 139.

Oleh karena itu perlu pembekalan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan khusus serta simulasi untuk menumbuhkan kepedulian terhadap penyandang cacat; dan

- 2) kurangnya pengetahuan mengakibatkan pada birokrat pengelola bangunan gedung belum tergerak untuk memberikan perhatian kepada penyandang cacat, sehingga kebutuhan penyandang cacat terabaikan.

Permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, menjadi penghambat dalam mengubah birokrasi menjadi peduli kepada kepentingan kelompok terpinggirkan, yang memerlukan perubahan yang mendasar di dalam dan diluar birokrasi pemerintah pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik. Dalam konsep pelayanan,¹⁸ dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu. Pelayanan publik merupakan salah satu bagian fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*). Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (*customer*) atau konsumen

(*consumer*) yang menerima layanan dari para penyedia layanan.

Masyarakat sebagai partner pemerintah dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan. Masyarakat memiliki posisi yang penting, sehingga aksesibilitas yang diterima oleh difabel juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat bertindak dan menyikapi difabel ini. Masyarakat kita pada umumnya masih tersentuh haru ketika melihat difabel di depan matanya. Sehingga reaksi yang lazim pertama muncul adalah perasaan belas kasihan yang kemudian ditindaklanjuti dengan perilaku santunan. Namun secara lebih rinci lagi sikap masyarakat terhadap keberadaan difabel dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok¹⁹

- a) Kelompok Apatitis: Kelompok yang tidak memperdulikan keberadaan komunitas difabel, baik secara perilaku maupun pikiran.
- b) Kelompok Pasif: Kelompok yang mengenal difabel dan dalam hidupnya pernah sesekali berinteraksi dengan kelompok difabel namun dia tidak tahu harus berbuat apa terhadap difabel. Kelompok pasif ini biasanya justru punya perasaan sungkan ketika harus berinteraksi dengan difabel.
- c) Kelompok Penyantun: Kelompok ini seringkali memandang difabel sebagai obyek santunan. Sehingga pikiran, sikap, dan tindakannya sering mengacu

¹⁸ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 11.

¹⁹ Agus Dwiyanto, 2008, *Pelayanan Inklusif*, makalah disampaikan pada diskusi terbatas

Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2008

pada perasaan belas kasihan untuk selalu ingin membantu (menyantuni).

Kelompok Pemberdaya: Kelompok ini melihat difabel sebagai persoalan ketidakadilan sosial. Mereka melihat difabel lebih sebagai korban dari pertarungan struktur kekuasaan sosial di masyarakat. Sehingga kelompok pemberdaya berpendapat bahwa santunan bukan cara tepat untuk menyelesaikan persoalan difabel. Menurut kelompok ini persoalan terletak pada terabaikannya hak-hak difabel. Sehingga cara yang tepat adalah mengembalikan hak-hak difabel dengan menciptakan ruang yang layak dan aksesibel bagi difabel untuk hidup sebagai anggota masyarakat secara utuh dan berkemandirian.

Berdasarkan keempat kelompok masyarakat tersebut, masyarakat Kabupaten Semarang tergolong sebagai kelompok Penyantun. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menyantuni difabel di lingkungan Kabupaten Semarang. Namun apapun keberadaan difabel, mereka layak untuk diperkukan dan memperlakukan diri secara santun dan diberdayakan sesuai dengan kemampuan hingga mencapai sebuah kemartabatan dalam hidup mereka. Santunan hanya akan melemahkan moral difabel yang pada akhirnya hanya akan meruntuhkan harga diri difabel.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang memerlukan pendekatan

yuridis dengan menyusun Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan Provinsi belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pemenuhan hak kemandirian ekonomi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Pengarusutamaan dan pemberdayaan diri penyandang disabilitas belum tercermin dalam program-program pembangunan daerah.

Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu segera menjadwalkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pelindungan Dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk dimasukan dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tahun 2019.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang harus melibatkan perwakilan pemangku kepentingan terutama Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Sosial, penyandang disabilitas dan akademisi untuk dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.

- Hardiansyah. 2001. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Katarina Tomasevski. 2001. *Hak atas Kesehatan (terjemahan) dalam Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Ifdhal Kasim, Johannes da Masenus Arus (ed). Jakarta: Elsam.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pipih Sopiah. 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Purwo Santoso. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Pelayanan Inklusif*. Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI.
- Agnes Dwi Jayani. 2014. *Konstruksi Different Abled People (Difabel) Studi Terkait Pandangan Mahasiswa Difabel di Universitas Gajah Mada*. Universitas Gajah Mada.
- <http://data.jatengprov.go.id>
- <https://lingkarsosial.wordpress.com>
- www.semarangkab.go.id
- www.suaramerdeka.com

MODERNITAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER MASYARAKAT DI DUSUN DUREN, DESA BARUKAN, KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

**Yonatan Yakub Mononimbar
Fibry Jati Nugroho**

STT Sangkakala, Jl. Raya Kopeng Km 7, Salatiga

Email: jonathan.mono10@gmail.com¹, fibryjatinugroho@gmail.com²

ABSTRAK

Dusun Duren adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Dusun ini adalah salah satu dari sekian banyak dusun yang saat ini mengalami dampak modernitas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan karakter masyarakat yang terdampak oleh hadirnya modernitas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dusun Duren, dan warga dusun setempat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Penelitian yang dilakukan di Dusun Duren Desa Barukan, Kecamatan Tengaran ini menemukan bahwa kehadiran modernitas telah membawa perubahan-perubahan terhadap pola-pola pendidikan karakter. Kehadiran modernitas membuat pola-pola lama dalam pendidikan karakter, tidak lagi efektif diterapkan di kalangan masyarakat pedesaan.

Penelitian yang dilakukan secara kualitatif deskriptif ini menghasilkan kesimpulan bahwa modernitas adalah arus yang tidak terbendung dan dihindari keberadaannya, sehingga membawa dampak dalam perilaku sosial masyarakat. Masyarakat perlu melakukan modifikasi pola-pola pendidikan karakter masyarakat agar nilai-nilai kearifan dapat diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pola-pola pendidikan yang melibatkan cara berpikir logis, merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam membangun karakter generasi masa kini. Nilai-nilai kearifan lokal yang sering dianggap “kuno” tidak boleh dihilangkan, tetapi justru penting untuk dilestarikan karena dapat menjadikan seseorang memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Kata Kunci : *Kearifan Lokal, Dusun Duren, Modernitas, Pendidikan Karakter*

PENDAHULUAN

Tema pendidikan karakter akhir-akhir ini menjadi topik yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, khususnya sejak pemerintah mencanangkan program sosialisasi pendidikan karakter sebagai

salah satu kebijakan nasional pada Tahun 2010. Pendidikan karakter menjadi agenda utama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bangsa, karena dengan mengembangkan pendidikan karakter diharapkan menjadi salah satu solusi yang mujarab dalam mengatasi banyak

permasalahan di Indonesia khususnya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut permasalahan umum.

Kebijakan nasional Indonesia menyatakan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan terhadap karakter adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi, karena dengan pembangunan karakter ini Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih baik.

Karakter dapat menjadi alat yang dapat membantu seseorang untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tanpa nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter yang baik, individu tidak bisa hidup bahagia dan tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi secara efektif. Tanpa karakter baik, seluruh umat manusia tidak dapat melakukan perkembangan menuju dunia yang menjunjung tinggi martabat dan nilai dari setiap pribadi.²¹

Pendidikan karakter akan tetap lestari hanya jika masyarakat memiliki kesadaran yang utuh terhadap seluk beluk karakter ini. karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila pada masing-masing bagian dalam sosialisasi kebijakan Nasional

Pembangunan Karakter Bangsa dikemukakan sebagai berikut:

1. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pentang menyerah, rela berkorban dan berjiwa patriotik.
2. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi IPTEK, dan reflektif.
3. Karakter yang bersumber dari olah raga / kinestetika antara lain bersih, dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih.
4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa, antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.²²

Lingkungan masyarakat pedesaan adalah salah satu tempat yang kental dengan berbagai nilai-nilai tradisional dan dianggap sebagai salah satu akar dari sebuah tradisi dan karakter khas keIndonesiaan. Salah satu nilai tradisional

²⁰ Lihat ulasan lengkap di dalam, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa*, (Pemerintah Republik Indonesia :2010), 1

²¹ Lihat Ulasan lengkap di dalam Likona Thomas, *Character Matters (Persoalan Karakter)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 22

²² Lihat selengkapnya di dalam pembahasan, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa*, (Pemerintah Republik Indonesia 2010), 22

yang mudah ditemukan pada komunitas masyarakat pedesaan ini adalah nilai-nilai karakter yang sebenarnya sejak lama telah hidup di lingkungan masyarakat ini. Menurut Bryan S. Turner, menyatakan bahwa “ *many aspect of traditional folk religion continue, especially in rural communities which are less exposed to globalisation. These folk traditions are embraced predominantly by the poorly educated and the oppressed, for whom religious activity promises to bring healing, comfort and riches*”²³ kondisi ini sangat mungkin terjadi karena masyarakat pedesaan sangat kecil sekali kemungkinannya terpapar oleh pengaruh globalisasi, sehingga nilai-nilai mendasar dari keyakinan masyarakat dapat berkembang dengan pesat. Permasalahan mendasar lain yang nampak, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, diperhadapkan dengan aktivitas keagamaan yang menjanjikan adanya penyelesaian dalam keyakinannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai tersebut semakin hari semakin tidak nampak. Bahkan, pelaksanaan nilai-nilai tersebut terkesan semakin aneh di mata masyarakat pedesaan masa kini. Beberapa contoh yang menggejala di kalangan masyarakat pedesaan diantaranya, semakin jarang orang melakukan hal-hal yang mencerminkan nilai sopan santun, banyak

pola hidup masyarakat yang mengalami perubahan, bahkan ada beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang mulai hilang dan tidak dikenal lagi oleh generasi muda.

Beberapa gejala lain yang cukup memprihatinkan adalah mulai banyak ditemui remaja-remaja yang enggan melakukan aktivitas seperti menyapa orang lain, meminta ijin ketika melewati orang yang lebih dewasa, dan semua itu didasari hanya karena merasa malu melakukannya. Banyak remaja yang tidak lagi mengenal nilai-nilai tradisional masyarakat seperti bertutur bahasa dengan orang lain, sikap menghargai orang lain juga semakin jarang ditemui.

Pada saat yang sama beberapa stasiun televisi swasta menayangkan *reality show* di televisi yang menyajikan kegiatan atau tayangan yang mengupas sisi lain dari karakter seseorang. Hanya orang yang memiliki karakter dengan tingkatan tertinggi saja yang sanggup melakukan hal-hal yang bodoh menurut pandangan kebanyakan orang. contoh tayangan acara tersebut antara lain “*TOLONG*”²⁴ yang mengisahkan bagaimana seseorang yang bersedia dengan tulus ikhlas membantu orang lain akan mendapat sebuah imbalan berupa uang dengan nominal yang relatif besar. “*PANTANG NGEMIS*”²⁵ menampilkan sisi lain kebaikan dari masyarakat dengan latar belakang ekonomi

²³ Turner Bryan S, *Religion and Modern Society*, (New York : Cambridge University Press, 2011), 224

²⁴ “Tolong” adalah salah satu acara reality show yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta yang ditayangkan pada era 2000an. didalamnya menayangkan tayangan yang bertujuan untuk menguji rasa peduli masyarakat terhadap kesusahan yang dialami oleh seseorang .

²⁵ “Pantang Ngemis” adalah salah satu reality show yang ditayang kan stasiun televisi swasta di Indonesia yang di dalamnya menampilkan bagaimana pembawa acara akan menguji seseorang dengan beberapa eksperimen, untuk mengetahui seberapa tangguh seseorang yang memiliki keterbatasan materi dan kemampuan, namun tetap berusaha untuk menampilkan karakter –karakter kebaikan.

yang kurang baik, dimana target tersebut akan diuji oleh team yang bertujuan ingin menguji kejujuran, semangat kerja keras, dan kasih mereka.

Karakterlah menjadi salah satu akar permasalahan yang mendasari tindakan seseorang. Menurut definisinya karakter adalah ciri khas dalam kepribadian seseorang yang mampu menjadi identitas sehingga dapat dibedakan dengan individu lain.²⁶ Wibowo menyatakan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi dari hasil kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.²⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah salah satu faktor yang menyebabkan gambaran perilaku masyarakat pedesaan mengalami perubahan. Perbedaan karakter antar generasi menjadi indikasi adanya perubahan pola pendidikan karakter yang terjadi. Modernitas menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan pola tersebut. Sehingga menjadi menarik untuk diteliti bagaimana kehadiran modernitas memberikan dampak terhadap terjadinya perubahan pola pendidikan karakter pada masyarakat pedesaan.

Masyarakat pedesaan di Jawa Tengah kental dengan banyaknya ungkapan-ungkapan yang menggambarkan nilai-nilai

karakter yang diajarkan. Beberapa diantaranya adalah: “*Desa mawa cara, negara mawa tata*” maknanya setiap tempat memiliki adat-istiadatnya sendiri yang harus dihormati dan dihargai. “*mikul dhuwur, mendem jero*” menjunjung tinggi-tinggi, memendam dalam-dalam. Ungkapan ini menggambarkan bagaimana seseorang harus menghormati orang tuanya, apabila suatu saat orang tua sudah tidak ada, seluruh ajaran yang pernah diberikan dan kebajikannya harus dijunjung tinggi, sedangkan segala kekurangannya dipendam sedalam-dalamnya. Kedua contoh ungkapan tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat pedesaan di Jawa telah mengenal pola pendidikan karakter di dalam keluarganya. Dalam penelitian ini masyarakat di Dusun Duren, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang akan diteliti lebih dalam menyangkut perkembangan Karakter yang ada di dalam masyarakat di dusun tersebut.

Masyarakat pedesaan di Dusun Duren menjadi objek kajian dalam penelitian ini karena komunitas masyarakat ini adalah yang paling “muda” dalam mengalami dampak kehadiran modernitas, terkait dengan pengembangan infrastruktur dan munculnya komodifikasi buruh murah di wilayahnya. Dengan demikian segala proses yang terjadi masih mungkin teramati dan dalam hal ini di daerah yang menjadi objek penelitian ini masih terdapat tiga generasi dengan tampilan karakter yang

²⁶ Suharjana, *Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan FIK Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 193

²⁷ Wibowo Agus, *Pendidikan Karakter Usia Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 66

berbeda. Generasi tersebut menurut peneliti diklasifikasikan dalam kelompok generasi muda²⁸, kelompok orang tua anak²⁹, kelompok usia lanjut³⁰. Lingkungan pedesaan dipilih sebagai objek dalam penelitian ini juga didasarkan pada sifat dasar dari lingkungan tersebut dimana di dalamnya banyak tersimpan nilai-nilai asli dari masyarakat. Nilai-nilai tradisional ini perlu dilestarikan karena didalamnya terkandung unsur karakter yang sangat banyak dan mengandung arti yang “dalam” sehingga dapat membekali kehidupan seseorang.

Modernisasi telah menjalar hingga kalangan masyarakat pedesaan dan hingga saat ini proses tersebut terus berlangsung. Beberapa gejala yang muncul dalam hal ini diantaranya, terjadinya perubahan komunikasi dan kemudahan mengakses informasi oleh masyarakat, mulai muncul sikap kritis dalam masyarakat pedesaan berkaitan dengan berbagai fenomena yang mereka amati. Berdasarkan beberapa gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pedesaan sedang mengalami proses modernisasi seperti yang dikemukakan oleh Alex Inkeles tentang ciri masyarakat modern.³¹ Pola-pola pendidikan karakter pada komunitas

masyarakat pedesaan dapat dikatakan saat ini sedang mengalami proses peralihan,³² sehingga sangat tepat untuk diamati kecenderungannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana kebenaran sesuai dengan hakekat obyek, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³³

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap dampak modernitas terhadap karakter masyarakat pedesaan, di Dusun Duren Desa Barukan. Penelitian ini tidak diarahkan pada kesimpulan salah-benar, tidak menguji suatu hipotesis diterima-ditolak, tetapi lebih ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan secara mendalam, dengan mengelompokkan narasumber dalam tiga kelompok generasi³⁴ sebagai perbandingan

²⁸ Generasi muda dalam penelitian ini selanjutnya disebut sebagai kelompok klasifikasi *kelompok kalitan*. Kelompok generasi ini berada pada rentang usia 15 sampai 25 tahun dan atau belum menikah

²⁹ Kelompok ini selanjutnya disebut sebagai kelompok *kelompok kaneman*, yaitu warga desa yang telah dengan rentang usia 25 sampai 50 tahun dan atau telah menikah.

³⁰ Kelompok usia lanjut dalam penelitian ini selanjutnya disebut sebagai *kelompok kasepuhan* yang terdiri dari warga desa dengan usia 50 tahun keatas.

³¹ Lihat ulasan selengkapnya di dalam Inkeles Alex, *Exploring Individual Modernity*, (New York : Columbia University Press, 1983), 31-42

³² Hasil observasi dan dokumentasi

³³ Lihat ulasan lengkap di dalam Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 51-52

³⁴ Ketiga generasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok pemuda, kelompok orang tua anak, dan kelompok orang tua lanjut (kakek, nenek dalam keluarga)

untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang terjadi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono,³⁵ menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).³⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dusun Duren adalah salah satu dusun yang berada pada Garis Lintang 7,2120, dan Garis Bujur 110,3215. Dusun ini berada pada ketinggian kurang lebih 702 meter di atas permukaan laut, dan dengan luas wilayah 254,61 meter persegi. Adapun letak secara administratif berada di Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten

Semarang, Jawa Tengah tepatnya. Secara administratif dusun ini adalah bagian dari wilayah Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang.³⁷

Adat dan Tradisi

Masyarakat Dusun Duren masih menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi Jawa yang berkaitan dengan batasan-batasan waktu dan tahap kehidupan manusia, diantaranya: tradisi *mitoni*, yaitu acara *selamatan* saat usia kandungan telah mencapai tujuh bulan. Tradisi *mitung dina* dan tradisi *nyewu*, *mendak pisan*, dan *mendak pindo* yaitu acara selamatan memperingati meninggalnya seseorang yang dilakukan pada hari ke tujuh, seribu, setahun, dua tahun. Tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk memohon berkah keselamatan.³⁸

Karakteristik Masyarakat

Masyarakat Dusun Duren cukup bersahabat dengan pendatang baru, atau orang asing. Masyarakat selalu menyambut baik para pendatang baru. Dari pengamatan peneliti, masyarakat Dusun Duren mudah akrab dengan orang-orang baru. Namun, apabila diamati lebih teliti akan nampak pada *kelompok kasepuhan* masyarakat desa ini sangat lekat dengan sikap yang *andap asor* yaitu sikap tidak menyombongkan diri, *nrimo* yaitu sikap menerima dan apa adanya, *setiti* yaitu sikap menjaga bahkan hingga kepada hal yang terkecil. Dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai sikap yang

³⁵ Ibid, 336

³⁶ Lihat ulasan lengkap di dalam Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 337-345

³⁷ Data diperoleh dari kantor desa Duren, 23 Juli 2017, pukul 10.15 WIB

³⁸ Wawancara dengan JYS dan MKM, sebagai modin dan sesepuh desa duren, di kediaman beliau, 5 Juli 2017, pukul 16.00 WIB dan pukul 19.20 WIB

mecerminkan ketekunan. *Ngajeni* yaitu sikap menghormati orang lain. *gotong royong* kegiatan bersama dalam rangka bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Istilah yang dipakai oleh warga setempat disebut dengan *gugur gunung*. Gugur artinya selesai, dan gunung artinya permasalahan.³⁹

Kepercayaan

Masyarakat Dusun Duren masih hidup dalam pola kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari jaman dahulu. Namun, lambat laun banyak nilai-nilai kearifan lokal yang terlupakan, beberapa kepercayaan yang masih mudah ditemukan pada masyarakat ini salah satunya adalah *Tepo sliro*⁴⁰ yaitu suatu sikap hidup dalam menempatkan diri ketika berinteraksi dengan orang lain sehingga dari padanya diperoleh sebuah keputusan yang tepat untuk bertindak.

Bahasa dan Simbol

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat dusun Duren. Selain bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga telah banyak dikuasai oleh masyarakat setempat. Bahasa Jawa dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: *Ngoko*, *kromo*, dan *kromo inggil*. *Ngoko* adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi dengan orang dalam usia sebaya. *Kromo* adalah bahasa jawa yang digunakan dalam komunikasi antara seseorang dengan orang yang setara namun hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghormati orang lain. *Kromo inggil*,

adalah bahasa jawa tingkat paling tinggi yang biasa digunakan dalam komunikasi antara seseorang dengan dengan orang yang lebih dewasa, lebih berpendidikan, lebih tinggi jabatannya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang dihormati. Tidak ada simbol-simbol khusus yang menunjukkan identitas masyarakat ini. seperti halnya penampilan masyarakat desa di Jawa Tengah, masyarakat dusun Duren juga demikian.

Pola Hubungan Sosial

1. Klumpukan

Nglumpuk biasanya dilakukan di “*ngamben*” atau tempat duduk yang luas yang dimiliki oleh hampir semua rumah warga. Dengan suguhan khas masyarakat desa seperti singkong dan ubi rebus, dengan penerangan lampu *Sentir* para pemuda *ngrubung* atau duduk melingkar dan tuan rumah akan berada di tengah dan mulailah pembicaraan kecil tersebut dilakukan.⁴¹ Tidak ada undangan yang disampaikan oleh tuan rumah dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kehadiran didasarkan pada rasa membutuhkan informasi dan adanya kebiasaan *nglumpuk* bersama teman-teman.⁴²

Tema-tema pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan kecil ini berkisar pada kejadian-kejadian yang ditemui warga dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan-permasalahan dalam pertanian, peternakan, pekerjaan, kehidupan keluarga juga sering dibicarakan

³⁹ Wawancara dengan bapak LD, warga tertua (104 tahun) di rumah, 20 Juli 2017, pukul 20.05 WIB

⁴⁰ Wawan cara dengan Bapak TMS, sesepuh desa Duren 21 Juli 2017 pukul 19.00 WIB

⁴¹ Wawancara dengan bapak LD, warga tertua (104 tahun) di rumah, 20 Juli 2017, pukul 20.05 WIB

⁴² Ibid

dalam pertemuan ini. pertemuan kecil ini akan berakhir jika tuan rumah telah lelah berbicara, dan materi yang dirasa perlu untuk disampaikan telah habis untuk hari itu.⁴³ Sehingga waktu pertemuan cukup bervariasi, kadang-kadang singkat, namun terkadang pembicaraan bisa berlangsung sampai larut malam. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar sebab orang tua pada masa itu juga mengajarkan agar pemuda-pemuda jangan tidur terlalu awal. Tidur larut malam adalah salah satu ciri dari orang yang tekun dan *prihatin* atau mampu menguasai diri dari keinginan lahiriah.

2. *Gugon tuhon*

Seperti masyarakat tradisional pada umumnya, kepercayaan-kepercayaan tradisional atau agama suku di masyarakat dusun Duren memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Agama suku atau kepercayaan tradisional yang sering disebut dengan istilah "*gugon tuhon*" ini adalah sebuah kepercayaan tentang hal-hal supranatural. *Gugon tuhon* berkaitan dengan waktu, tanggal, arah, pemilihan, warna, dan perhitungan-perhitungan.⁴⁴

Keberadaan *gugon tuhon* ini mempengaruhi hampir semua aktivitas masyarakat, dari kapan pemilihan waktu yang tepat untuk menebang pohon, arah yang benar untuk merobohkan pohon tersebut. Ke mana arah pergi seseorang jika hendak bekerja. Kapan pernikahan dilakukan, apa jenis pekerjaan yang cocok

berdasarkan tanggal kelahiran seseorang, dan lain sebagainya.⁴⁵

3. *Ngilmu*

Masyarakat Dusun Duren juga kental dengan agama-agama suku. Hal ini dilakukan oleh hampir semua orang dari yang muda sampai yang tua pada masa lampau. *Ngilmu* adalah tindakan seseorang yang menggunakan suatu kombinasi mantra dan ritual, untuk membantu mewujudkan keinginannya. Hal ini akan melibatkan beberapa ritual, diantaranya *nglakoni poso* atau puasa dan lafal mantera yang dibakukan menjadi sebuah *jopo*. Masyarakat belajar sejak mereka remaja dan hal tersebut dipelajari dari guru-guru spiritual yang tinggal baik di desa tersebut atau dari desa lain.⁴⁶ Tidak ada informasi yang jelas sejak kapan kebiasaan ini muncul, namun tradisi ini merupakan tradisi turun temurun.

4. *Ngwejang*

Ngwejang adalah serangkaian pesan-pesan yang di sampaikan oleh para orang tua dalam keluarga. Tidak ada waktu yang dikhususkan untuk melakukan aktivitas ini, atau ketika banyak orang berkumpul di rumah orang yang dituakan. Wejangan muncul kadang kala dengan terselip dalam cerita-cerita horor, cerita pengalaman masa lalu, cerita yang mengisahkan perjalanan hidup seseorang, dan cerita yang dibuat seolah-olah akan terjadi dikemudian hari. Nasehat-nasehat ada kalanya dilakukan

⁴³ Ibid

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak TMS, 21 Juli 2017, pukul 19.00 WIB

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak TMS 26 Juli 2017 di kediaman, pukul 20.30 WIB

langsung dimuka umum, namun lebih sering dilakukan dalam bentuk perumpamaan. Contoh: “*yen mangan kui ojo maton*”⁴⁷

5. *Jagong lan ular-ular*

Aktivitas ini adalah kegiatan berkumpul bersama yang diikuti oleh warga masyarakat, biasanya diadakan dalam rangka memperingati hari-hari tertentu, atau diselenggarakan secara resmi dengan tujuan tertentu. Dalam kegiatan tersebut diselipi dengan *ular-ular* atau semacam kata-kata bijak yang disampaikan oleh orang yang dituakan di desa tersebut. Yang membedakan antara wejangan dalam aktivitas *nglumpuk* dan acara *jagongan* adalah pada pola komunikasi yang bersifat satu arah saja.

Pesan-pesan moral disampaikan oleh orang yang ditugaskan berbicara dalam kesempatan tersebut. Hal-hal yang bersifat praktis dan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat selalu menjadi tema utama dalam *ular-ular* yang disampaikan oleh *sesepuh*. Tidak luput pula koreksi terhadap perilaku masyarakat dan materi dasar yang berkaitan dengan dasar-dasar pola hidup bermasyarakat, kerukunan, gotong-royong, tolong-menolong, saling menghargai antar sesama manusia, kebersihan lingkungan dan pelestarian alam, disampaikan dalam kesempatan tersebut.

⁴⁷ Maton :adalah posisi duduk dan menempatkan makanan ketika melakukan aktivitas makan

Modernitas dan Paradigma Pendidikan Karakter Menurut Persepsi Masyarakat Dusun Duren

Perkembangan zaman yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Duren dapat dikatakan cukup signifikan. “*nek didelok, saiki wes longko omah kayu, meh kabeh tembok, ora ketung gur nganggo batako. Sak iki ora ono wong nang pasar mlaku, kabeh wes numpak pit montor dewe-dewe, cah cilik-cilik wae saiki cekelane hp. Mbahne wae malah kalah karo putune*”.⁴⁸ [kalau diperhatikan, sekarang sudah jarang ditemukan rumah yang dibuat dari kayu, hampir semua ber dinding tembok, walaupun hanya dinding batako. Sekarang tidak ada lagi orang pergi ke pasar dengan berjalan kaki, sekarang mereka sudah naik sepeda motor sendiri-sendiri, anak-anak kecil sekarang mahir menggunakan hand phone, orang tua kalah dengan cucunya] Pernyataan di atas menggambarkan bahwa perkembangan jaman telah menjangkau semua lapisan masyarakat dan telah bersinggungan dengan semua orang dari anak-anak sampai masyarakat lanjut usia.

Anak merupakan aset yang berharga, menjadi sebuah keharusan bahwa setiap orang tua harus mengutamakan perhatian yang tertuju kepada kehidupan anak. Pernyataan di atas adalah gambaran persepsi orang tua masa kini. Hal tersebut telah menjadi pola berpikir umum yang dihidupi oleh keluarga *kelompok kaneman*.⁴⁹ Pola pendidikan yang dikerjakan oleh orang tua dalam keluarga

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak LD, sesepuh desa tertua, 20 Juli 2017, pukul 20.05 WIB

⁴⁹ FGD kelompok wanita 23 April 2017, 18.30 WIB

tidak banyak. Harapan orang tua hanya tertuju kepada sikap menurut anak kepada orang tua. Selebihnya, melihat anak tenang dan tidak mengganggu orang tua, itu dirasa sudah cukup membantu. Mayoritas keluarga *kelompok kaneman* berpendapat bahwa peran keluarga dalam mendidik anak sangat besar. Karena menurut mereka keberhasilan anak akan ditentukan oleh bagaimana pola asuh dari orang tua.⁵⁰ Nilai-nilai kebajikan pada pandangan masyarakat disetujui sebagai hal baik yang harus menyertai setiap langkah kehidupan seseorang. Menurut masyarakat tanpa menjalankan nilai-nilai kebaikan tersebut manusia tidak dapat hidup dengan baik, dan selalu saja akan ada pertentangan dan permasalahan dalam hidupnya. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari harus senantiasa didasarkan pada nilai-nilai kearifan tersebut.⁵¹

Kelompok kasepuhan di dusun Duren senantiasa mengusahakan melakukan pola-pola pendidikan karakter seperti yang pernah mereka terima dari orang tua mereka jaman dulu. Baik itu melalui wejangan-wejangan dari orang tua maupun orang yang dituakan di dusun Duren, dan juga melalui nilai-nilai kearifan yang mereka temukan ketika *kelompok kasepuhan* berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ada kalanya *kelompok kasepuhan* menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang mereka temukan tanpa disengaja, dan solusi-solusi semacam itu

kurang dapat diketahui asal muasalnya. Contoh: dalam proses mengolah nira hingga menjadi Gula Jawa, dibutuhkan 11 tahapan yang harus dikerjakan, namun banyak warga tidak mengetahui mengapa hal ini harus dilakukan dan sejak kapan kebiasaan ini dilakukan,⁵² dalam hal ini pun tidak tidak diketahui kepastiannya. Namun apa bila pada salah satu tahapan pembuatan gula ini ditemukan permasalahan, maka dengan berkonsultasi dengan tetangga, akan ditemukan banyak solusi.

Demikian pula halnya dengan berbagai nilai-nilai kehidupan yang mendasari kehidupan masyarakat di dusun Duren, banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dihidupi masyarakat namun sulit untuk diketahui asal usulnya. Masyarakat *kelompok kasepuhan* banyak mendasarkan kehidupan sehari-hari pada nilai-nilai kearifan lokal yang diperoleh dari warisan generasi sebelumnya, yang diperoleh secara turun temurun. Dalam hal ini kontribusi agama belum nampak dominan, karena dasar pemikiran tentang nilai-nilai kebajikan ditemukan berdasarkan hasil pengembangan konsep ungkapan "*ora cidro*",⁵³ yang selanjutnya dikembangkan dan mendasari setiap tindakan masyarakat.

Pada *kelompok kaneman* diperoleh data bahwa masyarakat generasi ini memang sering mendapat wejangan-wejangan dan komentar dari generasi sebelumnya, namun pada pandangan *kelompok kaneman*, hal ini

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak LD,MSR,TMS,WRN

⁵² FGD di rumah bapak MSR 12 Agustus

⁵³ Sebuah konsep pemahaman masyarakat bahwa manusia tidak boleh menciderai dan tidak boleh diciderai baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri, karena hal menciderai akan mengakibatkan kerugian.

hanya memperkeruh suasana serta mencari posisi aman adalah kebiasaan yang sering dilakukan guna menghindari konflik dengan *kelompok kasepuhan*. "aku nek wes mulai kerjo ki nek diarohi malah bingung, luwih apik tak neng ke wae arep omong opo, nek ra yo malah tak tinggal sisan"⁵⁴ [jikalau saya sudah memulai kerja itu, bila saya dikomentari berkenaan dengan cara kerja saya, akan membuat saya menjadi bingung, lebih baik jika hal itu terjadi, lebih baik saya diamankan saja mau dikomentari apa saja, atau saya tinggal pergi saja] ungkapan-ungkapan semacam ini sering terlontar dari hasil wawancara terhadap *kelompok kaneman* dan *kalitan*, yaitu apabila mereka merasa terusik oleh banyak komentar dari *kelompok kasepuhan* berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh *kelompok kaneman* dan *kalitan*.

Pola-pola teguran langsung dan *wejangan* yang bersifat preventif masih dilakukan oleh *kelompok kasepuhan* terhadap *kelompok kaneman* dan *kelompok kalitan*, hal ini dirasa cocok untuk dilakukan karena mereka pun mengalami hal yang sama di waktu lampau. Namun, pola-pola semacam ini dipandang oleh *kelompok kaneman* dan *kelompok kalitan* sebagai sesuatu yang tidak lagi sesuai dan kurang cocok diterapkan pada jaman sekarang. *Kelompok kasepuhan* masih menjaga ajaran – ajaran yang diperoleh dari generasi – generasi sebelumnya. Seperti halnya tradisi *slametan*, adalah salah satu tradisi yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari. Namun, pelaksananya sering kali menjadi akar pertentangan antara *kelompok kasepuhan* dan *kelompok kaneman* dan *kelompok kalitan*. Sebagai contoh ketika di salah satu persimpangan jalan sering terjadi kecelakaan, maka *kelompok kasepuhan* merasa perlu melakukan *slametan* di tempat tersebut. *Kelompok kasepuhan* beranggapan bahwa tradisi *slametan* perlu dilakukan karena menjadi media untuk memohon keselamatan, dan terhindar dari segala musibah. Tradisi ini menjadi tradisi turun temurun hingga *kelompok kasepuhan* namun *kelompok kaneman* dan *kelompok kalitan* memandang hal ini sebagai sebuah kebiasaan yang tidak perlu dilakukan. Dalam pemahaman *kelompok kaneman* dan *kelompok kalitan* ritual semacam ini tidak masuk diakal dan bertentangan dengan ajaran agama atau *musrik*. Tidak jarang dalam forum diskusi terbuka masalah ini sering menjadi bahan ejekan dan sindiran dari *kelompok kaneman* kepada *kelompok kasepuhan*.⁵⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Modernitas yang terjadi di lingkungan masyarakat Dusun Duren telah membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat desa. Perubahan pola berpikir, keyakinan tentang nilai-nilai kehidupan, orientasi masyarakat, nilai-nilai kearifan lokal dan pola hubungan masyarakat turut mengalami perubahan. *Generasi kasepuhan, kaneman, dan kalitan* yang hidup pada masa yang sama, memiliki keyakinan yang beragam dalam hal

⁵⁴ Wawancara dengan Ytn, ibu rumah tangga di desa Duren RT27, Agustus 2017, di rumah ibu Ytn 10.30 WIB.

⁵⁵ Diperoleh dari data wawancara dan dokumentasi dari desa Duren dan kepala desa serta beberapa sesepuh desa Duren, September 2017.

keyakinannya tentang pandangan hidup. Perbedaan tersebut terjadi akibat dari hadirnya modernisasi di lingkungan masyarakat.

Dalam pandangan *kelompok kasepuhan* masyarakat Dusun Duren, nilai-nilai kebajikan tradisional yang diperoleh secara turun temurun merupakan sebuah pandangan hidup yang telah teruji kemujarapannya membawa kehidupan manusia kepada sebuah capaian “*ayem tentrem*” yang diyakini merupakan tingkatan kehidupan yang ideal bagi generasi tersebut. Sementara di sisi lain *kelompok kaneman* berpandangan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diturunkan dari generasi sebelumnya dipandang tidak lagi sesuai dengan konteks kekinian. Dalam hal ini modernitas telah memberikan fasilitas khusus bagi *kelompok kaneman* untuk dapat melihat suatu situasi dengan menawarkan berbagi sudut pandang yang lebih luas. Modernitas telah menghadirkan sebuah situasi yang memungkinkan tumbuh suburnya suasana demokratis dimana setiap orang memperoleh kebebasan menempatkan diri dalam sebuah komunitas sosial.

Berdasarkan kesimpulan tersebut beberapa rekomendasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu penguatan kelembagaan pengelola dan pengembangan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan perannya dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

2. Proses peralihan tongkat estafet pembangunan daerah perlu mempertimbangkan lebih dalam tentang bagaimana karakter yang dimiliki oleh kandidat yang akan dipromosikan, agar dapat berjalan dengan baik.
3. Pembangunan aspek karakter masyarakat perlu dikembangkan untuk mempertahankan lestari nilai-nilai kearifan lokal.
4. Bagi masyarakat Dusun Duren perlu melakukan modifikasi dalam pelaksanaan pola-pola pendidikan karakter kepada generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Inkeles Alex. 1983. *Exploring Individual Modernity*, New York : Columbia University Press.
- Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa*. 2010. Pemerintah Republik Indonesia.
- Likona Thomas. 2016. *Character Matters (Persoalan Karakter)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suharjana. 2012. *Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
- Turner Bryan S. 2011. *Religion and Modern Society*. New York: Cambridge University Press.

- Wibowo Agus. 2012. *Pendidikan Karakter Usia Dini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durkheim, Emile. 1954. *The Elementary Forms of the Religious Life*. Joseph Ward Swain (trans). London: George Allen & Unwin Ltd.
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society, Volume I*. California : The Regents of University of California.

PERAYAAN KEBERAGAMAAN DI TENGAH PERBEDAAN (POTRET TOLERANSI DI DUSUN KENTENG, DESA SUMOGAWE, KECAMATAN GETASAN, KABUPATEN SEMARANG)

Fibry Jati Nugroho

STT Sangkakala, Jl. Raya Kopeng Km 7, Salatiga

Email: fibryjatinugroho@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan sebuah potret toleransi yang ada dan berkembang di wilayah Dusun Kenteng, Sumogawe Kabupaten Semarang. Nilai-nilai luhur sebagai kearifan lokal dipakai sebagai pondasi membangun keberagaman di dalam praktik toleransinya. Melalui kajian deskriptif analisis, dengan memakai kajian literatur, dilengkapi dengan wawancara dan pengamatan sebagai sarana pengumpulan datanya, serta dianalisis menggunakan *AnalysisInteractive* Model dari Miles dan Huberman didapati bahwa nilai luhur terkait Pandangan tentang Kosmologi Jawa dan *Kawruh Begja* melekat di dalam masyarakat, didukung dengan Etika Jawa perihal *Ngajeni lan nepakake* menjadi penguat dalam praktik toleransi di masyarakat. Ketiga hal tersebut dapat terjadi didukung dengan ada pola introduksi, internalisasi dan implementasi yang saling bertautan di dalam pelaksanaannya. Potret toleransi ini menjadi sebuah stimulan untuk merayakan keberagaman di tengah perbedaan.

Kata Kunci : *Toleransi, Kearifan Lokal, Masyarakat Jawa*

PENDAHULUAN

Keberagaman di dalam masyarakat mulai digoncang kembali untuk dapat diseragamkan. Virus penyeragaman mulai menyebar dan menjangkiti banyak kalangan. Apabila meminjam istilah Marx, virus ini tidak hanya menjangkiti mulai kaum proletar, sampai mewabah di kalangan orang borjuis. Kaum akademisi tidak ketinggalan mulai menjadikannya sebagai bahan obrolan, diskusi, sampai dengan perdebatan panjang. Doktrin agama dan kesilapan budaya menjadi kambing hitam dari penyeragaman dan ketertolakan kaum liyan dari yang lain.

Pengelolaan keberagaman diperlukan sejak dini di dalam diri setiap masyarakat, supaya dapat memupuk rasa menghargai dan menerima dengan lapang dada beragam perbedaan yang ada di sekitarnya. Penanaman keberagaman dapat dimulai di dalam komunitas, dengan menghargai pihak lain yang berada di luar kelompoknya. Ini dapat terjadi ketika komunitas ini berada dalam jalur yang benar dan mengerti dengan benar nilai-nilai pembentuk masyarakat.

Pada dasarnya, di dalam diri masyarakat telah tertanam nilai-nilai yang dapat dijadikan alat dalam pengelolaan

keberagamaan. Apabila nilai-nilai itu dihidupkan kembali, akan dapat menjadi motor penggerak bagi tumbuh kembangnya keberagamaan di dalam diri komunitas masyarakat yang lain. Pengetahuan yang mendalam tentang identitas kelompok, akan dapat menjadikan filter dan penyubur bagi penyemaian benih keberagamaan sejak dini di dalam diri kelompok tersebut. Dalam bahasa yang lain, nilai-nilai yang berkembang tersebut merupakan sebuah kekayaan komunitas dan biasa disebut dengan kearifan lokal.

Apabila menelisik lebih jauh, kearifan lokal sendiri merupakan sebuah kekayaan yang sangat berharga di dalam diri masyarakat. Potensi ini seharusnya digali dan kemudian dikelola dengan baik sebagai alat yang manjur demi terciptanya penghargaan terhadap keberagamaan di sekitarnya. Dalam hal ini, kearifan lokal yang ada di masyarakat Jawa dapat menciptakan kedamaian dan penghargaan kepada yang lain diantaranya dengan memakai nilai luhur tersebut sebagai perekat dan pematiknya.

Di tengah pengelolaan keberagamaan yang mulai gamang di bangsa ini, masyarakat Dusun Kenteng yang terletak di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dapat menjadi sebuah potret yang indah bagi pengelolaan keberagamaan di tengah keberagamaan masyarakat. Dusun yang mempunyai tiga tempat ibadah dari tiga agama tersebut, tetap harmonis dan saling menghargai satu

dengan yang lain. Potret keharmonisan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana keharmonisan di Dusun Kenteng dapat terjadi? Apa faktor yang membentuknya? Pertanyaan ini akan dijawab di dalam tulisan ini, sehingga dapat menjadi sebuah model pengelolaan keberagamaan di tengah masyarakat yang beragam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivism* dimana kebenaran sesuai dengan hakekat obyek, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵⁶ Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap data dan informasi sebanyak mungkin tentang pendidikan kristen yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini tidak diarahkan pada kesimpulan salah-benar, tidak menguji suatu hipotesis diterima-ditolak, tetapi lebih ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lokasi penelitian secara mendalam.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono,⁵⁷ menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan

⁵⁶Lihat ulasan lengkap di dalam Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 51-52

⁵⁷Ibid, 336

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).⁵⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dusun Kenteng terletak di wilayah Pemerintahan Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Dari sisi historisnya, Dusun Kenteng didirikan oleh seorang tentara Kerajaan Mataram bernama Kertanegara. Bersama dengan istrinya, Kertanegara melarikan diri dari kejaran tentara Belanda, dan bersembunyi di hutan yang sekarang menjadi wilayah administratif dusun Kenteng. Setelah dirasa cukup aman, Kertanegara bersama dengan istrinya memulai kehidupannya di hutan tersebut dan bercocok tanam untuk melanjutkan hidupnya.⁵⁹ *Lumpang Kenteng* yakni alat yang dipakai untuk menumbuk padi masih dapat dijumpai sampai sekarang.

⁵⁸Lihat ulasan lengkap di dalam Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 337-345

⁵⁹Data diambil berdasarkan penuturan sesepuh dusun Kenteng orang biasa memanggilnya *Mbah Hardjo*. Berdasarkan penuturannya, secara tradisi oral terdapat perbedaan cerita mengenai asal Kertanegara. Ada yang menyebut berasal dari Mataram, namun ada yang menyebutnya dari Banten. Namun, apabila ditilik dari peninggalan *Lumpang Kenteng*, Kertanegara lebih pas berasal dari Mataram.

Peninggalan tersebut memperkuat keberadaan Kertanegara yang pernah hidup di wilayah dusun Kenteng. Di sisi lain, terdapat situs Batu Besar yang dipercaya sebagai tempat Kertanegara “bersembahyang” kepada Yang Maha Kuasa.

Batu besar itu terletak di perkebunan warga di wilayah Dusun Kenteng. Batu besar tersebut berbentuk datar di bagian atasnya, dan dapat digunakan untuk duduk bersila layaknya orang bersemedi. Tak jauh dari Batu Besar tersebut, terdapat pula beberapa batu yang berukuran lebih kecil, yang dipercaya sebagai tempat duduk para *danyang* yaitu para pengikut Kertanegara. Sebuah makam yang terletak di sisi timur dusun Kenteng dipercaya oleh masyarakat sebagai makam Kertanegara dan istrinya.⁶⁰ Makam tersebut dikenal “angker” oleh masyarakat dusun setempat. Berdasarkan penuturan warga, sampai dengan sepuluh tahun yang lalu menjelang malam tidak ada warga yang berani melintas di wilayah makam. Ada cerita yang berkembang di warga Kenteng, bahwa pernah suatu kali seorang warga menjelang *maghrib*⁶¹ melewati wilayah makam. Warga tersebut tidak dapat keluar dari wilayah makam dan hanya memutar-mutar di

Peninggalan itu masih ada dan terdapat di wilayah dusun Kenteng.

⁶⁰Berdasarkan penuturan Bp. Sukimin, yaitu juru kunci Makam dusun Kenteng. Makam tersebut sangat disakralkan, dan sering dipakai untuk bersembahyang meminta berkah oleh para sesepuh dusun Kenteng.

⁶¹Mahgrib merupakan sebutan waktu pada menjelang pukul enam malam hari. Biasanya waktu ini di kalangan warga dusun Kenteng digunakan untuk berada di dalam rumah, sembahyang dan tidak beraktivitas di luar rumah.

wilayah tersebut sampai pagi.⁶² Kejadian mistis inilah yang kemudian membuat wilayah makam disakralkan oleh masyarakat.

Sakralisasi makam dan cerita mistis di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Dusun Kenteng. Meskipun banyak agama yang masuk di Dusun Kenteng, namun keyakinan mistis tersebut tidak dapat diingkari. Apabila menilik dimensi keberagamaannya, masyarakat Dusun Kenteng mayoritas memeluk agama Budha, Islam dan Kristen, di samping beberapa masyarakat masih memeluk *kejawen* sebagai keyakinannya. Tiga agama besar tersebut belum mampu mendekonstruksi cerita mistis yang beredar di dalamnya. Kearifan keyakinan Dusun Kenteng masih dijadikan tolok ukur bermasyarakat, meskipun agama besar sudah masuk di dalam masyarakat. Di wilayah Dusun Kenteng ini juga akan dengan mudah dijumpai dalam satu keluarga mempunyai agama yang berbeda dan tetap dianggap wajar.

Secara administratif, Dusun Kenteng terletak di wilayah Desa Sumogawe. Desa Sumogawe merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Getasan. Desa ini terletak di jalur lintas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sebagai desa yang terletak di wilayah lereng Gunung Merbabu, potensi terbesar terletak pada produksi susu sapi perah. Terdapat tidak kurang 10 kelompok tani ternak yang tersebar di berbagai dusun, dengan tiga perusahaan

pengolahan susu pasteurisasi. Dari lima belas desa yang ada di wilayah Kecamatan Getasan, Desa Sumogawe merupakan desa terluas ke empat dengan jumlah penduduk terbanyak. Di sisi lain, keberagaman agama menjadi warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Agama Islam, Kristen, Katolik dan Budha beserta dengan tempat ibadahnya akan mudah dijumpai di wilayah ini. Tidak jarang dijumpai Vihara, Masjid dan Gereja berdampingan dengan indahny di wilayah desa ini.

Di Dusun Kenteng sendiri, terdapat 3 Gereja, 1 Masjid, 1 Mushola dan 1 Vihara. Keberagaman yang ada di masyarakat Dusun Kenteng menciptakan keunikannya sendiri. Apabila di wilayah lain hanya satu hari raya keagamaan saja yang ramai diperingati, maka ada tiga hari raya besar yang diperingati oleh warganya, selain satu acara tradisi dusun yaitu *saparan*. Setiap hari besar agama Budha, maka pemeluk agama lain akan saling berkunjung dan memberi selamat kepada pemeluk agama yang merayakan hari besarnya. Hal yang sama pun juga terjadi demikian, pada pemeluk agama yang lain. Tradisi saling berkunjung untuk memberi ucapan dan bersilaturahmi, menjadi kekhasan dari masyarakat kampung Dusun Kenteng.

Keberagaman yang ada di wilayah Dusun Kenteng merupakan potensi yang perlu dirawat sekaligus dikelola dengan baik. Cara pengelolaan dan perawatan keberagaman yang terbaik adalah melalui nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang

⁶²Berdasarkan wawancara dengan warga, cerita ini beredar di kalangan masyarakat dan dikenal dengan istilah *oyot mimang*.

di dalamnya. Kearifan lokal yang ada dan dihidupi oleh masyarakat Dusun Kenteng dapat merekatkan dan mendamaikan ketika ada gesekan di dalam masyarakat. Adapun kearifan lokal yang dihidupi, menjadi roh pemersatu dan pemelihara keberagaman di Dusun Kenteng adalah :

1. Kosmologi Jawa

Di dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Tuhan secara umum dikonsepsikan sebagai yang transenden. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut mempunyai arti menembus, teramat sangat. Secara maknawi, Tuhan dipandang sebagai sosok yang mutlak, yang ada sebelum adanya alam semesta, yang supranatural dan yang mengatur jagad semesta. Masyarakat Jawa selalu meyakini ada penguasa alam semesta, yang apabila dikuasai, diadaptasi dalam kehidupan akan mendatangkan berkah.⁶³ Dalam keyakinannya tersebut, Tuhan dikonsepsikan sebagai karib yang istimewa, yang diyakini selalu ada dalam setiap keberadaan manusia. Tuhan ditempatkan di posisi super, misterius, di atas kekuatan manusia. Tuhan adalah pengatur hidup,

hanya dengan batin, manusia dapat melukiskan apa saja tentang Tuhan.⁶⁴

Masyarakat Jawa mengkonsepsikan bahwa wahyu diturunkan dari para dewa yang menguasai alam semesta, dan berfungsi untuk menenangkan hidup. Konteks agama Jawa, wahyu sangat dekat dengan *pulung*⁶⁵ dan tidak dapat lepas dari konsep *begja*.⁶⁶ Masyarakat Jawa selalu mengedepankan *Kawruh Begja*, yang datang dari *Kang Gawe Urip*.⁶⁷ Wahyu yang dianggap berasal dari para dewa, yang perlu diraih dengan *Laku*⁶⁸ dan negosiasi. *Laku* ini cenderung mengarah kepada dunia gaib atau alam gaib, yang didalamnya akan didapati kekuatan gaib atau kekuatan sakti. Sesuai dengan konteks kepercayaan agama Jawa, dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos dalam pikiran orang Jawa adalah sikap dan pandangan hidup terhadap alam semesta, yang mengandung kekuatan-kekuatan supranatural (adikodrati). Dalam makrokosmos pusat alam semesta adalah Tuhan. Alam semesta memiliki hirarki yang ditujukan dengan adanya jenjang alam kehidupan dan adanya tingkatan dunia yang semakin sempurna (dunia atas – dunia

⁶³ Lihat ulasan lengkap di dalam Suwardi Endraswara, *Agama Jawa*, (Yogyakarta : Narasi, 2015), 41

⁶⁴ Untuk pendalaman konsep Tuhan dalam kebatinan dapat dilihat pada Suwardi Endraswara, *Kebatinan Jawa* (Yogyakarta : Lembu Jawa, 2011), 171 - 180

⁶⁵ Dalam konteks Jawa, *Pulung* merupakan penanda mendapat keberuntungan dari Yang Ilahi. Biasanya orang yang kejatuhan pulung hidupnya akan dipenuhi oleh belas kasihan kepada sesama. Banyak orang akan hormat sehingga ia disegani. Pulung berkarakter cinta kasih. Sehingga jatuhnya pulung akan memilih orang yang akan memilih orang yang menjalani upaya lahir dan batin atau keprihatinannya mengamalkan cinta kasih kepada sesama, dalam mewujudkan keindahan, ketenteraman dunia.

⁶⁶ Begja mempunyai arti harfiah keberuntungan. Banyak orang Jawa meyakini *begja* atau *kabegjan* merupakan berkah yang turun dari atas, seperti halnya keyakinan rezeki sudah diatur Gusti Allah. *kabegjan* merupakan hak prerogatif Sang Mahakuasa yang bisa diturunkan dengan berbagai cara kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kata *begja* atau *kabegjan*, jadinya, mengandung makna spiritual bagi yang percaya.

⁶⁷ Lihat ulasan lengkap di dalam Suwardi Endraswara, *Agama Jawa*, (Yogyakarta : Narasi, 2015), 41-43

⁶⁸ Secara harfiah kata *Laku* mempunyai arti sebagai perilaku. Namun, dalam konsep Jawa kata ini dimengerti sebagai perilaku, tindakan dan sikap hidup yang sesuai dengan amanat dari para dewa.

manusia – dunia bawah). Sikap dan pandangan terhadap dunia nyata (mikrokosmos) adalah tercermin pada kehidupan manusia dengan lingkungannya, susunan manusia dalam masyarakat, tata kehidupan manusia sehari-hari dan segala sesuatu yang nampak oleh mata.⁶⁹

Dengan keyakinan akan adanya dunia adikodrati, masyarakat Jawa mencirikan adanya kekaguman akan hal-hal atau peristiwa gaib, yang tak dapat diterangkan oleh akal, namun dapat dirasakan dan diyakini di dalam kehidupannya. Keyakinan akan hal yang gaib kemudian memunculkan mitos dan simbol yang dipercaya sebagai perwujudan dari dunia gaib tersebut. Mitos yang berkembang di agama Jawa sangat bervariasi, bergantung dengan kultur, lokasi dan kondisi masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat petani meyakini mitos Dewi Sri sebagai dewi kesuburan, sehingga di akhir panen senantiasa diadakan acara *slametan* sebagai rasa syukur kepada Sang Dewi, karena sudah memberikan berkah kesuburan. Mitos agama Jawa yang bervariasi, bukan mengaburkan kepercayaan masyarakat, justru mempertebal keyakinan. Mitos menghidupkan suasana kebatinan dan memberikan rasa ketenangan di dalamnya. Keyakinan akan sesuatu yang gaib tersebut, kemudian memunculkan kekaguman dan tindakan upacara ritual di dalamnya.

Pandangan kosmologi Jawa tersebut sangat kental di kalangan masyarakat dusun Kenteng. Penuturan Kepala Dusun Kenteng

masyarakat di wilayahnya sangat *rigid* dalam menjaga keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Sebagai contoh, suatu waktu ada seorang yang bersitegang dengan sesama warga dusun, maka berdampak pada *pagebluk* yaitu banyak warga desa yang sakit secara hampir bersamaan. Ketika ada *pagebluk*, sesepuh desa kemudian melakukan ritual di tempat yang disakralkan di dusun Kenteng, untuk “berdamai” dengan penguasa teritorial setempat, dan menghimbau kepada seluruh warga yang mempunyai masalah dengan sesama warga untuk segera diselesaikan. Alhasil, *pagebluk* tersebut selesai dan telah penyakit selesai di wilayah dusun. Berkaca dari kejadian tersebut, keharmonisan dan saling menghargai antar warga selalu terpelihara sampai dengan sekarang. Pandangan tentang kosmologi Jawa inilah yang membuat toleransi masih tetap terjaga di lingkungan dusun Kenteng.

2. Kawruh Begja

Kawruh Begja merupakan sebuah olah *rasa* dalam masyarakat Jawa. Olah *rasa* di sini meliputi gejolak nalar, rasa dan keinginan orang Jawa dalam melangsungkan kehidupannya. Kedalaman dan keahlian olah *rasa* inilah yang membedakan tingkat kematangan dan kedewasaan di dalam masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa, pengalamam olah *rasa* inilah yang menjadi sebuah pengalaman, baik tentang kedalaman mengenal diri sendiri, ataupun mengenal orang lain. Jika ia telah mengenal dirinya dengan baik, maka ia akan mudah

⁶⁹ Lihat ulasan lebih lengkap di dalam Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang : Cakrawala, 2003), 2-16

menghargai perihal hidup dan matinya. Oleh sebab itu, kondisi hidup dan mati dalam masyarakat Jawa senantiasa dikaitkan dengan keadaan *rasa* seseorang.⁷⁰

Dalam Kawruh Begja, dikenal bahwa dalam hidup tidak perlu banyak memiliki *japa mantra* yang *muluk-muluk* dan dalil yang pelik-pelik, namun di dalam hidup hanya perlu berpegang pada perbuatan *caturmurti*.⁷¹ Perbuatan yang dimaksud merupakan sebuah perpaduan dari empat hal yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Jika keempat hal ini dapat berpadu dan menyatu, maka seseorang tersebut akan mendapat *kasunyatan*, yaitu apa yang dipikirkan, sejalan dengan yang dirasakan, dikatakan dan dilakukan. Dampak dari *kasunyatan* akan memberikan ketenangan di dalam batin maupun hidupnya. Dalam kosmologi masyarakat Jawa, apabila keempat hal tersebut tidak dilakukan, maka akan datang *ganjaran* di kehidupannya. Hal yang baik akan diganjar hal yang baik, pun sebaliknya. Oleh sebab itu, di dalam alam pikir masyarakat Jawa, *caturmurti* ini selainnya dilakukan secara maksimal, supaya apa yang terjadi di dalam dirinya, selaras dengan apa yang terjadi di luar dirinya.

Konsep *kawruh begja* yang di dalamnya terdapat nilai *caturmurti* menjadikan masyarakat di Dusun Kenteng menjaga sikap dan tindakannya. Nilai ini terinternalisasi di dalam diri masyarakat, sehingga dapat menjadikannya sebagai

penyaring terhadap tindakannya. Salah satu implementasi dari nilai tersebut tampak di dalam sikap menghargai keyakinan orang lain. Dalam penuturannya, seorang sesepuh Dusun Kenteng memaparkan bahwa penghargaan atas keyakinan orang lain itu merupakan wujud dari kehidupan yang mempraktekan *caturmurti*. Jika seseorang tidak menghargai orang lain, maka akan mendapat ganjaran *malapetaka* di dalam kehidupannya, dan juga sebaliknya. Itulah sebabnya, masyarakat Dusun Kenteng saling menghargai pemeluk keyakinan lain di dalam komunitasnya. Nilai kearifan lokal inilah yang menjadi salah satu penguat toleransi dan keberagaman di Dusun Kenteng.

3. *Ngajeni lan nepakake*

Pada tahun 2002, Niels Mulder memberi pernyataan bahwa telah terjadi pergeseran dalam standar etika dan moralitas Jawa. Masyarakat Jawa telah menjadi steril terhadap moral. Kondisi ini merupakan sebuah gejala *malaise* kebudayaan, yaitu kondisi yang tidak enak dan gundah terhadap budaya.⁷² Hal ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, bahwa etika Jawa telah tergerus dengan beragam budaya, mulai dari konsumtivisme, individualisme, materialisme dan beragam isme-isme yang lain. Di tengah kegalauan budaya yang ada, etika dalam masyarakat Jawa memperhatikan kemanusiaan dan kesusilaan, bukan hanya di tindakannya, tetapi memperhatikan sampai dengan *unen-*

⁷⁰ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta : Cakrawala, 2010), 212

⁷¹ Ciptoprawiro, *Allah Tuhan Gusti*, (Surabaya: Yayasan Djojo Bojo, 1996), 34

⁷² Niels Mulder, *Moralitas Jawa Kini Mulai Tergusur dalam Matabaca*, (Jakarta, Gramedia, 2002), 24

unen dari setiap strata sosialnya. Etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa bukan hanya pada tahap sikap, tetapi sampai kepada etika bahasa dan etika pertemuan. Standar etika inilah yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa.

Di tengah kemerosotan standar moral di kalangan masyarakat Jawa, di dusun Kenteng terdapat etika yang luhur di tengah gerusan budaya dari luar. Dalam penuturan sesepuh dusun, konsep etika yang seringkali diajarkan kepada *anak putu* yaitu perihal *ngajeni lan nepakake*. Dalam konsep tersebut terdapat pengajaran tentang mampu menghargai orang lain, dan menempatkan diri di dalam kondisi dan situasi sosial yang ada. Pengajaran ini terinternalisasi dan terlihat dalam sikap dan tutur kata keseharian warga dusun. Warga dusun akan secara otomatis menyalakan *switch socialnya* ketika berhadapan dengan jenjang usia yang berbeda. Dalam pertemuan-pertemuan warga masyarakat Dusun Kenteng, tanpa dikomando para pemuda akan mengambil alih semua persiapan dan sembari bersimpuh ketika melewati orang yang lebih tua.

Pada bagian yang lain, perihal kehidupan beragama, apabila ada perayaan hari besar agama lain, warga gereja akan mengganti waktu ibadahnya, dengan tujuan supaya tidak mengganggu kekhusukan warga agama lain. Hal yang menarik, apabila perayaan hari besar agama lain bertepatan pada masa umat Muslim berpuasa, maka perayaan tersebut digeser ke waktu sebelum atau sesudah puasa. Kondisi ini tetap terpelihara sampai sekarang, sehingga keharmonisan antar warga masyarakat

tetap terpelihara sampai sekarang. Warga antar agama dan beda keyakinan dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Dusun Kenteng di wilayah Getasan dapat menjadi sebuah potret bahwa nilai-nilai luhur dari tradisi lokal dapat menjadi sumber penguatan toleransi di wilayah tersebut. Dengan adanya nilai luhur tersebut, masyarakat dapat hidup berdampingan dan saling menghargai di tengah perbedaan yang ada. Dari potret toleransi yang ada di dusun Kenteng didapati bahwa diperlukan tiga hal dalam merayakan perbedaan sebagai sebuah kesatuan, yaitu :

1. Introduksi

Warga masyarakat perlu mengenal budaya lokal yang ada di dalam komunitasnya, sehingga mereka tidak kehilangan akar dan ajaran budayanya. Banyak masyarakat Jawa yang mulai tergerus dengan budaya luar, sehingga seringkali dikenal *wong jawa ilang jawane*. Hal ini tidak akan terjadi apabila sesepuh desa digandeng oleh pemerintah desa mengintroduksi nilai-nilai yang ada di wilayah tersebut, dan dikenalkan mulai dari pertemuan RT sampai dengan pertemuan dusun. Introduksi yang bertahap dan komprehensif dapat dipakai untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur lokal kepada warga baik antar generasi, maupun kepada pendatang yang ada di lingkungan tersebut.

2. Internalisasi

Nilai-nilai luhur yang hanya dikenalkan dan tidak diinternalisasikan ke dalam kehidupan warga masyarakat akan menjadi sebuah pelajaran saja. Pelajaran yang

dikenalkan seharusnya diberikan wadah untuk dapat diinternalisasi ke dalam kehidupan masyarakat. Penghayatan akan nilai-nilai luhur tersebut dapat dimulai dengan cara memberikan pengajaran secara berulang-ulang, baik di dalam keluarga, ataupun di pertemuan masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga dapat ditempelkan di lingkungan dusun, mulai dari Pos Kamplang, Taman Obat Keluarga, sampai dengan *cangkrukan* yang ada di wilayah dusun. Apabila nilai-nilai tersebut diajarkan secara berulang-ulang dan diberikan porsi yang mendalam dalam pengenalannya, maka akan muncul penghayatan di dalam warga masyarakatnya. Internalisasi nilai-nilai luhur inilah yang membuat seseorang akan melakukan tindakan secara sukarela tanpa perlu diberi hadiah ataupun hukuman.

3. Implementasi

Nilai-nilai luhur yang telah diinternalisasi perlu diimplementasikan ke dalam praksis kehidupan di dalam masyarakat. Implementasi ini sangat penting untuk melihat ketercapaian dan keberhasilan di dalam fase introduksi dan internalisasi. Apabila implementasi ini tidak berjalan dengan baik, perlu dilihat kembali bagaimana tahap introduksi atau internalisasinya, sehingga siklus ini dapat terlihat berjalan dengan baik.

Ketiga usulan siklus tersebut di atas merupakan sebuah model yang dapat dipakai berdasarkan potret toleransi yang ada di Dusun Kenteng. Siklus tersebut dipakai untuk dapat mempertahankan nilai-nilai lokal di suatu daerah, dan kemudian

menjadi sebuah sarana untuk memperkuat keharmonisan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberagamaan acapkali menimbulkan sebuah friksi di dalam masyarakat. Pengelolaan keberagamaan diperlukan dalam rangka membangun dan memelihara keharmonisan di tengah masyarakat. Dusun Kenteng dapat menampilkan potret pengelolaan keberagamaan yang berbasis pada kearifan lokal, khususnya nilai-nilai luhur yang ada di wilayah setempat. Pandangan tentang Kosmologi Jawa dan *Kawruh Begja* melekat di dalam masyarakat, sehingga terlihat dalam perilaku dan tata bahasanya. Etika Jawa perihal *Ngajeni lan nepakake* menjadi penguat dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari pandangan kosmologinya.

Ketiga hal tersebut merupakan sebuah nilai yang tertanam dan berkembang di dalam masyarakat dusun Kenteng. Ini semua dapat terjadi dikarenakan ada pola introduksi, internalisasi dan implementasi yang saling bertautan di dalam pelaksanaannya. Potret toleransi di dusun Kenteng, menjadi sebuah gambaran bahwa nilai-nilai luhur dari masyarakat dapat digali dan dijadikan sebagai sebuah sumber pengelolaan keberagamaan di dalam masyarakat. Kearifan lokal telah menjadi “agama lokal”, yang diyakini dan tertanam kuat di dalam masyarakat, untuk dapat membangun kehidupan bersama. Kearifan lokal dan nilai luhur dapat diperkuat untuk menanamkan nilai kemanusiaan dan kesusilaan dalam rangka membangun rasa keberagamaan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciptoprawiro. 1996. *Allah Tuhan Gusti*. Surabaya: Yayasan Djojo Bojo.
- Endraswara, Suwardi. 2015. *Agama Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Kebatinan Jawa*. Yogyakarta: Lembu Jawa.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala.
- Mulder, Niels. 2002. *Moralitas Jawa Kini Mulai Tergusur dalam Matabaca*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

ANALISIS USAHA INDUSTRI POTENSIAL KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN TINGKAT UPAH DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

Edy Dwi Kurniati

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI
Sudirman Ungaran, Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur 50514*

Email: kurni_edy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada era liberalisasi perdagangan, upah tenaga kerja yang tinggi selain menunjukkan perhatian juga menunjukkan kemampuan perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Peningkatan upah juga tetap menunjukkan efisiensi jika dikonversi menjadi produktivitas dan kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan tipologi sektor usaha berdasarkan tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang yang berguna untuk merumuskan kebijakan pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai potensi peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Penelitian dilakukan berdasarkan data hasil survei data upah, jumlah tenaga kerja dan kebutuhan hidup layak (KHL) pada sektor usaha di luar sektor pertanian oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan di Kabupaten Semarang. Analisis tipologi sektor usaha dilakukan dengan pengembangan analisis *Klassen Typology* dengan memetakan sektor usaha berdasarkan upah dan penyerapan tenaga kerja. Sektor usaha potensial yaitu sektor usaha yang mempunyai kemampuan dalam memberikan upah dan penyerapan tenaga kerja tinggi. Hasil penelitian menemukan bahwa sektor industri Meubel/Furniture, Garment dan Industri Makanan Kecil merupakan sektor ekonomi yang potensial dalam memberikan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Sektor ekonomi yang mempunyai upah tenaga kerja tinggi namun penyerapan tenaga kerja rendah adalah: Real Estate, Industri Manufaktur. Sektor ekonomi yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja tinggi namun upah rendah adalah sektor industri Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/ Pengolahan. Sektor ekonomi yang mempunyai upah dan penyerapan tenaga kerja rendah adalah sektor usaha jasa, otomotif, penyedia air bersih.

Kata Kunci: *Sektor Usaha Potensial, Upah, Penyerapan Tenaga Kerja, Klassen Typology*

LATAR BELAKANG

Teori ekonomi yang mendukung keberadaan pengaruh karakteristik pengusaha terhadap upah telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir (mis. *Efficiency Wage Theory, Insider-Outsider*

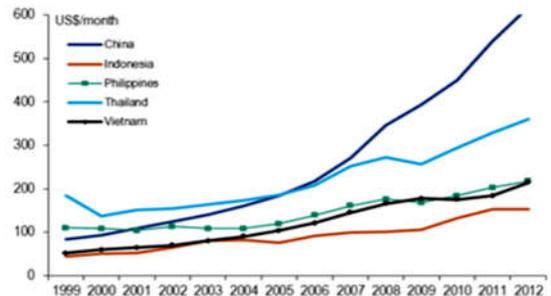
Theory, Rent-Sharing Theory). Perbedaan upah tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi (ketrampilan, kemampuan dan produktivitas pekerja) dan pasar tenaga kerja seperti dijelaskan dalam teori ekonomi klasik dan neoklasik, namun juga nilai tambah modal dan strategi berbasis

sektoral (Drahokoupil dan Piasna, 2017). Perbedaan upah dalam pendekatan sektoral (Du Caju et al, 2010; Magda et al., 2008; Rycx, 2003; Rycx dan Tojerow, 2007; Silva dan Guimarães 2017) didefinisikan sebagai perbedaan antara upah rata-rata yang diperoleh oleh kelompok atau sektor yang berbeda, yang dievaluasi secara berbeda, berdasarkan pada atribut non-produktif. Analisis berbasis sektoral seperti Rycx (2003) menemukan ada perbedaan upah antara pekerja di sektor yang berbeda, bahkan setelah mengendalikan karakteristik individu, kondisi kerja dan ukuran perusahaan. Sektor-sektor dengan upah terbaik meliputi: sektor listrik, gas, uap dan pasokan air panas, lembaga keuangan (tidak termasuk asuransi dan dana pensiun), pos dan telekomunikasi, dan industri penyulingan minyak, dan bahan bakar nuklir. Sementara itu, di sektor tradisional (hotel dan restoran, industri tekstil dan ritel), upahnya paling rendah. Studi empiris lainnya (misalnya Martins 2004; Magda et al.. 2008; Du Caju et al.. 2010) menemukan perbedaan besar antar sektor dalam pengembalian modal yang disebabkan oleh perbedaan dalam mekanisme pembagian sewa, pada tingkat agregat, lembaga korporat mempersempit perbedaan dalam perbedaan upah antar-industri setelah mengontrol karakteristik pekerja dan tempat kerja. Silva dan Guimarães (2017) menemukan tingkat pengembalian di sektor non-pariwisata lebih tinggi dibandingkan di sektor pariwisata, dan juga menyimpulkan bahwa di sektor jasa Brasil, kesenjangan upah berasal dari perbedaan karakteristik pekerja mempengaruhi tingkat pengembalian

modal pada industri pariwisata. Analisis upah dalam pendekatan keunggulan komparatif, perusahaan memiliki keunggulan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu karena mampu menyediakan sampai ke tangan konsumen dengan biaya yang lebih rendah, yang berarti juga dengan harga jual yang lebih murah. Di era globalisasi peran keunggulan komparatif yang hanya mengandalkan input (buruh murah, sumberdaya alam dan modal) makin berkurang dan bergeser pada peran keunggulan kompetitif yang lebih mencerminkan suatu pencapaian dalam efisiensi atau produktivitas tenaga kerja. Untuk bersaing di pasar regional dan global, Industri di Indonesia tidak hanya dapat bersaing berdasarkan keunggulan komparatif tenaga kerja dengan upah yang rendah, namun perlu merubah orientasi daya saing berbasis keunggulan kompetitif (Brakman et al., 2013). Menurut Arbache (2001) pemahaman tentang upah dan penyerapan tenaga kerja pendekatan sektoral tidak hanya menghasilkan implikasi teoritis, tetapi juga berdampak pada tingkat kebijakan publik dan selanjutnya dapat berkontribusi secara meyakinkan pada desain kebijakan publik untuk pasar tenaga kerja, distribusi pendapatan, ketimpangan regional, kemampuan kerja, ketimpangan sosial, pengembangan industri dan masalah lokal, serta dimensi-dimensi lainnya.

Daya tarik Indonesia adalah pasar domestik yang besar dan juga upah yang kompetitif. Bahwa Upah di Indonesia masih tercatat

sebagai upah yang paling murah (Gambar 1). Pada tahun 2012, upah, bulanan di Indonesia adalah sebesar USD 172, di bawah Vietnam (USD 215) dan Thailand (USD 328). Upah di Cina sudah tinggi (USD 550) di atas Brazil (USD 350) dan Mexico (USD 456). Keunggulan komparatif perusahaan di Indonesia adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan murah karena adanya kekayaan (*endowment*) yang telah tersedia, seperti: sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah. Namun demikian, kedua keunggulan tersebut telah berkurang. Sumberdaya alam mulai berkurang, sedangkan biaya tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 1997, Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia adalah sebesar Rp 135 ribu, naik menjadi Rp 667,9 ribu pada tahun 2007 (BPS, 2014) dan pada tahun 2014, Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) kawasan Jabotabek sebesar Rp 2.200.000,00. Nilai upah minimum bulanan di Indonesia Tahun 2012 hanya 161,3 dollar AS per bulan. Jumlah upah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Thailand yang sudah memberi upah buruh sebesar 283,54 dollar AS per bulan.



Sumber: Bank of America Merrill Lynch Global Research estimates, CEIC

Perbandingan Upah di Indonesia dengan Negara Asean dan China

Berdasarkan data KSPI, upah minimum negara Asia dan sekitarnya, khususnya Indonesia, masih jauh tertinggal di banding Australia yang sudah mencapai 3.901,89 dollar AS per bulan yang disusul dengan Selandia Baru sebesar 2.620,09 dollar AS per bulan dan Jepang 2.560,72 dollar AS per bulan. Pada Tahun 2014, Standar upah minimum regional Bangkok dan beberapa daerah lainnya di Thailand sebesar US\$ 233 per bulan. Vietnam memiliki upah minimum dari US\$ 79 menjadi US\$ 113 per bulan. Malaysia akan pertama kali memberlakukan sistem UMR, dengan standar untuk Kuala Lumpur adalah sebesar 900 ringgit (US\$ 300) per bulan. Apabila dibandingkan dengan negara berkembang, secara nominal upah tersebut relatif besar namun secara produktivitas tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah. Dengan demikian, biaya per unit barang atau jasa menjadi relatif mahal (*Bank of America Merrill Lynch Global Research Estimates, 2014*).

Upah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019

Tahun	diatas UMK		dibawah UMK		Total*)		UMK	KHL
	Jumlah	%	Jum	%	Jum	%		
2014	71	93,42	5	6,58	76	100,00	1.208.200	1.247.000
2015	13	54,17	11	45,83	24	100,00	1.419.000	1.390.000
2016	21	87,5	3	12,5	24	100,00	1.610.000	1.560.000
2017	23	79,31	6	20,69	29	100,00	1.745.000	1.780.000
2018	49	85,00	7	15,00	56	100,00	1.900.000	1.840.000
2019	40	82,22	8	17,78	48	100,00	2.055.000	2.050.000

(Ket: *)Sampel Survei Dinas Tenaga Kerja ((2014-2019), UMK=Upah UMK Minimum Kabupaten/Kota, KHL= Kebutuhan Hidup Layak

Di Kabupaten Semarang, jumlah perusahaan yang mempunyai upah di bawah UMK mengalami penurunan. Pada tahun 2014-2019 menunjukkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang prosentasenya semakin meningkat. Pada tahun 2014, sebagian besar (93,4%) perusahaan mempunyai upah sudah berada diatas UMK dan menurun menjadi 15% - 20,69% pada tahun 2017-2019 (Tabel 1). Kebutuhan hidup layak (KHL) selalu meningkat tiap tahun yang diikuti dengan peningkatan UMK. Pada tahun 2014 KHL di Kabupaten Semarang sebesar Rp. 1.247.000 dan pada tahun 2019 sudah mencapai Rp 2.052.500. Pada Tahun 2014 UMK di Kabupaten Semarang sebesar Rp. 1.208.200 dan pada tahun 2019 sudah mencapai Rp 2.055.000.

Peningkatan tekanan biaya upah tenaga kerja perlu dikonversi menjadi peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi, karena ancaman kehadiran perusahaan asing dengan modal yang lebih kuat, akan

memaksa perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dengan biaya yang lebih murah. Dalam hal ini pemetaan sektor potensial berbasis upah dan penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan. Sektor potensial sektor yang mampu dan mau memberikan kesejahteraan tenaga kerja lebih tinggi menunjukkan efisiensi dan produktivitas. Perusahaan-perusahaan di Indonesia harus bisa beroperasi lebih efisien serta mengutamakan kualitas, karena tekanan biaya upah, dan kehadiran perusahaan asing dengan modal yang lebih kuat, akan memaksa mereka untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dengan biaya yang lebih murah. Disamping itu, peningkatan upah akan memberi dampak positif dari sisi permintaan produk pangan, *fashion*, ataupun konsumsi lainnya. Dengan demikian kemampuan bersaing berdasarkan konsep keunggulan komperatif dan kompetitif perusahaan-perusahaan Indonesia dapat diperoleh lagi apabila secara nasional mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kualitas di samping menciptakan stabilitas secara makro. Perusahaan-perusahaan tentu saja dapat berkontribusi terhadap kedua faktor tersebut melalui pemilihan strategi usaha yang tepat. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menentukan strategi pengembangan terhadap sektor potensial tersebut, sehingga mampu mendorong peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja serta menumbuhkan kegiatan ekonomi didaerah.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dan memetakan sektor potensial di Kabupaten Semarang

berdasarkan tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja. 2) Merumuskan kebijakan pengembangan sektor potensial di Kabupaten Semarang berdasarkan potensi peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.

TINJAUAN LITERATUR

1. Teori Upah

Perbedaan upah dalam ekonomi neoklasik mengacu pada nilai yang diciptakan dalam proses produksi (Drahokoupil dan Piasna, 2017). Dalam model neoklasik, dengan asumsi persaingan pasar yang sempurna dalam pasar tenaga kerja dan pasar modal, faktor-faktor produksi, termasuk tenaga kerja dan modal, akan dihargai sesuai dengan produktivitasnya. Dengan demikian laba ditentukan oleh tingkat produktivitas marjinal modal, dan upah pekerja pada gilirannya ditentukan oleh produktivitas marjinal tenaga kerja. Proses produksi, menurut model ini, menentukan tidak hanya pembagian produk sosial, atau nilai tambah, antara modal dan tenaga kerja, tetapi juga di antara pekerja individu, yang produktivitas individualnya ditentukan oleh tugas dan keterampilan pekerja. Serikat pekerja dalam model ini akan menimbulkan inefisiensi dan pengangguran.

Pendidikan dan pengalaman merupakan indikator penting dari produktivitas dan upah pekerja dalam pendekatan produksi. Menurut Lillo-Bañuls dan Casado-Díaz (2011), sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang berlaku untuk produksi barang, jasa dan pengetahuan baru yang diakumulasikan oleh individu melalui pendidikan dan

pelatihan, serta sepanjang pengalaman kerja mereka. Istilah ini juga mencakup kemampuan dan bakat bawaan, yang keduanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan individu, terutama keluarga mereka.

Kritik terhadap model neoklasik diantaranya dijelaskan oleh Robinson dan Eatwell (1973) yang menghubungkan produktivitas marjinal pekerja dengan produktivitas marjinal modal yang digunakan. Pada pendekatan ini, laba tidak ditentukan dalam proses produksi, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari biaya modal yang dibayarkan terhadap pekerja. Demikian pula, kontribusi individu pekerja terhadap nilai tambah keseluruhan, apakah mereka manajer, pekerja terampil atau pekerja rutin, tidak dapat diukur hanya dalam proses produksi.

Rycx (2003) menjelaskan bahwa perbedaan upah dapat terjadi antara individu yang sama yang ditempatkan dalam kondisi kerja yang berbeda. Individu yang sama bekerja dalam situasi yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan kompensasi upah. Studi awal tentang proses penentuan upah diantaranya dilakukan oleh Slichter (1950) yang menemukan bahwa ada perbedaan upah di AS antara pekerja dengan karakteristik individu yang sama namun dalam kondisi sektor yang berbeda. Pendekatan sektoral (Silva dan Guimarães, 2017) menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja berbeda sesuai dengan wilayah geografis, kualifikasi pekerja, industri, sektor kegiatan. Para pendukung gagasan tersebut cenderung membagi menjadi sektor "primer" dan "sekunder". Pekerjaan

"sekunder" dicirikan oleh produktivitas rendah, penyerapan tenaga kerja tinggi, mekanisasi rendah, upah rendah, produksi barang bernilai tambah rendah, tingginya PHK, pergantian pekerja yang tinggi dan serangkaian karakteristik sosiologis yang menyertainya. Sedangkan pekerjaan sektor "primer", ditandai dengan produktivitas tinggi, upah tinggi dan rendahnya turnover tenaga kerja terampil.

2. Teori Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif

Teori keunggulan komparatif diperkenalkan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa suatu negara harus mengkhususkan dan ekspor barang dan jasa yang relatif lebih produktif daripada negara-negara lain dan mengimpor barang-barang dan jasa yang negara-negara lain relatif lebih produktif daripada negara-negara lain (Griffin *et al.*, 2010). Teori keunggulan komparatif pada dasarnya merupakan perluasan dari teori keunggulan "absolut" yang dikemukakan oleh Adam Smith, dimana keunggulan absolut merupakan kasus khusus dari dari keunggulan komparatif. Teori keunggulan absolut pertama kali disajikan oleh Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" pada tahun 1776. Menurut teori keunggulan absolut, setiap Negara mampu memproduksi barang tertentu secara lebih efisien daripada Negara lain (dengan kata lain memiliki keunggulan absolut untuk barang tersebut) melalui spesialisasi dan pengelompokan kerja secara internasional (*international division of labor*). Perdagangan diantara dua Negara, dimana masing-masing memiliki keunggulan

absolut dalam produksi barang yang berbeda, akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keunggulan absolute dapat diperoleh karena adanya perbedaan dalam faktor-faktor seperti iklim, kualitas tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi atau kewirausahaan (*entrepreneurship*). Keuntungan absolut adalah kemampuan untuk menghasilkan yang baik dengan sumber daya yang lebih sedikit daripada produsen lain (Ayers, 2005). Menurut Schumpeter (1983: 374), "tampaknya percaya bahwa di bawah perdagangan bebas semua barang akan diproduksi melalui biaya absolut dalam hal biaya tenaga kerja yang rendah (Brakman dan van Marrewijk, 2009)." Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya disadari bahwa perdagangan yang saling menguntungkan tidak selalu menuntut setiap Negara harus memiliki keunggulan absolut dibanding mitra dagangnya. Oleh karena itu, menurut teori ini, suatu negara harus mengkhususkan diri untuk mendapatkan manfaat dari keunggulan perdagangan. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika dapat memproduksi suatu barang dengan biaya kesempatan lebih rendah daripada negara-negara lain.

Teori Keunggulan Kompetitif dikembangkan oleh Porter (1990) dalam bukunya berjudul "*The Competitive Advantage of Nations*". Menurut Porter, "kemakmuran Nasional dibuat, tidak diwariskan". Kemakmuran tumbuh sebagai warisan alam di suatu negara, tenaga kerja, suku bunga, atau nilai mata uangnya. Keunggulan kompetitif dari negara adalah kapasitas industri untuk

berinovasi dan meng-*upgrade* untuk membentuk daya saing suatu negara. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari memiliki pemasok berbasis agresi, pesaing domestik yang kuat, dan menuntut pelanggan lokal. Konsentrasi klaster geografis atau perusahaan yang didirikan keunggulan kompetitif di berbagai bagian industri yang sama. Menurut Porter, negara-negara yang berpotensi berhasil dalam industri nasional adalah yang paling menguntungkan. Menurutnya terdapat empat atribut utama yang bisa membentuk lingkungan dimana perusahaan-perusahaan lokal berkompetisi sedemikian rupa, sehingga mendorong terciptanya keunggulan kompetitif. Keempat atribut tersebut (Porter, 1990: 78) adalah sebagai berikut. a. Kondisi factor produksi (*factor conditions*), yaitu posisi suatu negara dalam factor produksi (misalnya tenaga kerja terampil, infrastruktur, dan teknologi) yang dibutuhkan untuk bersaing dalam industri tertentu. b. Kondisi permintaan (*demand conditions*), yakni sifat permintaan domestik atas produk atau jasa industri tertentu. c. Industry terkait dan industry pendukung (*related and supporting industries*), yaitu keberadaan atau ketiadaan industry pemasok dan “industry terkait” yang kompetitif secara internasional di Negara tersebut. d. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan, yakni kondisi dalam negeri yang menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan dibentuk, diorganisasikan, dan dikelola serta sifat persaingan domestik. Factor-faktor ini, baik secara individu maupun sebagai satu system, menciptakan konteks dimana

perusahaan-perusahaan dalam sebuah Negara dibentuk dan bersaing. Ketersediaan sumber daya dan ketrampilan yang diperlukan untuk mewujudkan keunggulan kompetitif dalam suatu Industry; informasi yang membentuk peluang apa saja yang dirasakan dan arahan kemana sumber dan daya dan ketrampilan dialokasikan; tujuan pemilik, manajer, dan karyawan yang terlibat dalam atau yang melakukan kompetisi; dan yang jauh lebih penting, tekanan terhadap perusahaan untuk berinvestasi dan berinovasi. Porter juga menyimpulkan bahwa lingkungan adalah factor terdepan, memberi tantangan, dan dinamis sehingga negara berhasil dalam industri tertentu (Cho et al., 2000). Perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dari tindakan inovasi. Perusahaan melakukan inovasi melalui teknologi baru dan cara-cara baru. Inovasi dapat direpresentasikan dalam desain produk baru, proses produksi baru, atau strategi pemasaran baru. Upaya untuk merespon kesempatan pasar yang baru dapat berkontribusi untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui beberapa inovasi. Inovasi menghasilkan keunggulan kompetitif ketika pesaing lambat untuk merespon. Misalnya, di otomotif dan industri elektronik rumah tangga, perusahaan-perusahaan Jepang memfokuskan pada model kapasitas yang lebih kecil dan lebih rendah sedangkan pesaing asing justru menghindari keuntungan rendah dan daya kualitas rendah (Cho et al., 2000).

Jadi sektor usaha yang mempunyai potensi peningkatan kesejahteraan, mengedepankan produktivitas, efisiensi

dan kualitas serta mempunyai penyerapan tenaga kerja tinggi yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor tersebut merupakan potensi yang dimiliki oleh daerah terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, sektor tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah. Untuk mengetahui potensi ekonomi daerah, dapat digunakan pendekatan analisis Tipologi Klassen.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Tahun 2019. Sektor unggulan yaitu sektor dengan kesejahteraan tenaga kerja tinggi dan penyerapan tenaga kerja tinggi. Tingkat kesejahteraan diukur dari kesejahteraan ekonomi yang merupakan selisih antara upah dengan kebutuhan hidup layak. Analisis dilakukan dengan pendekatan : analisis tipologi *klassen*, dengan memetakan sektor industri berdasarkan upah dan penyerapan tenaga kerja dalam empat kuadran.

Analisis tipologi *klassen* digunakan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman terkait pemetaan serta sektor ekonomi potensial daerah yang dapat memberikan tingkat kesejahteraan tenaga kerja tinggi serta dapat menyerap tenaga kerja tinggi. Dengan analisis tipologi *klassen* ini sektor-sektor dalam perekonomian dapat

diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: Kuadran I merupakan sektor dengan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja tinggi. Kuadran II merupakan sektor dengan kesejahteraan rendah dan penyerapan tenaga kerja tinggi. Kuadran III merupakan sektor dengan kesejahteraan rendah dan penyerapan tenaga kerja rendah. Kuadran IV merupakan sektor dengan kesejahteraan tinggi dan penyerapan tenaga kerja rendah. Berdasarkan hasil tersebut dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Semarang berbasis kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja. Penentuan kategori suatu sektor terhadap empat kategori tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Matrik Tipologi Klassen

kesejahteraan tenaga kerja	$k_{ik} \leq k_{ip}$	$k_{ik} > k_{ip}$
penyerapan tenaga kerja		

$r_{ik} > r_{ip}$	Kuadran II sektor dengan kesejahteraan rendah dan penyerapan tenaga kerja tinggi	Kuadran I sektor dengan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja tinggi
$r_{ik} \leq r_{ip}$	Kuadran III sektor dengan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja rendah	Kuadran IV sektor dengan kesejahteraan tinggi dan penyerapan tenaga kerja rendah

Keterangan:

r_{ik} : Kesejahteraan tenaga kerja rata-rata sektor i di Kabupaten Semarang

r_{ip} : UMK di Kabupaten Semarang

r_{ik} : Penyerapan tenaga kerja sektor i di Kabupaten Semarang

r_{ip} : Penyerapan tenaga kerja rata-rata semua sektor di Kabupaten Semarang

Analisis *Klassen Typology* digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap sektor-sektor usaha Kabupaten Semarang berdasarkan besarnya kontribusi tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja. Yang

No	Usaha yang disurvei	Rata-rata Tenaga Kerja/Unit Usaha	Rata-rata Upah	Keterangan Upah
1	Jasa Konstruksi	25	2,055,000	Sesuai UMK
2	Perbankan	77	2,210,000	Di atas UMK
3	Real Estate	30	2,405,000	Di atas UMK
4	Retail	220	2,050,000	Di bawah UMK
5	Penyedia Air bersih	170	1,323,000	Di bawah UMK
6	Kerajinan Perhiasan	312	2,155,000	Di atas UMK
7	Otomotif (<i>Dealer and Service</i>)	34	2,055,000	Sesuai UMK
8	Percetakan/ Printing/ Sablon	145	2,355,000	Di atas UMK
9	Perdagangan Makanan Kecil	15	2,500,000	Di atas UMK
10	Industri Manufaktur	400	2,475,000	Di atas UMK
11	Meubel/ Furniture	89	2,535,000	Di atas UMK
12	Barecore/ Pengolahan	149	1,725,000	Di bawah UMK
13	Garment	869	1,209,000	Di atas UMK
14	Perusahaan Jasa	56	2,205,000	Di atas UMK
	Rata-rata	185	2,090,000	1,113,790

dapat dilihat pada tabel diatas.

Pada Tahun 2019 sektor usaha garment dan industri manufaktur non garment merupakan sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang dengan kontribusi rata-rata sebesar 869 dan 400 tenaga kerja per unit usaha di Kabupaten Semarang, lalu diikuti sektor kerajinan perhiasan dan retail dengan kontribusi rata-rata sebesar 312 dan 220 tenaga kerja per unit usaha, diikuti sektor penyedia air bersih dan percetakan/sablon/printing, dan usaha

HASIL PENELITIAN

Analisis Tipologi Klassen

Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi di Kabupaten Semarang Tahun 2019 (dalam %)

Keterangan: UMK 2019= Rp 2,055,000,00

Sumber: Survei Dinas Tenaga Kerja (2019)

barecore atau pengolahan, dengan kontribusi rata-rata sebesar 145 s/d 170 tenaga kerja per unit usaha. Sedangkan sektor yang mempunyai rata-rata kontribusi paling kecil adalah sektor jasa-jasa, perbankan, real estate, otomotif, perdagangan makanan kecil, mebel/furniture yang menyerap tenaga kerja sekitar 15 s/d 86 orang. Berdasarkan tingkat upah tenaga kerja, sektor yang memiliki upah tenaga kerja rata-rata paling tinggi adalah mebel/ furniture dan perdagangan makanan kecil sebesar Rp 2,535 s/d 2,500,000 , diikuti real estate dan industri manufaktur sebesar Rp 2,405,000 dan 2,475,000. Percetakan/ Sablon/ Printing sebesar Rp. 2,355,000, perbankan dan perusahaan jasa sebesar Rp 2,205,000 s/d Rp 2,210,000. Sedangkan sektor yang mempunyai rata-rata upah paling kecil adalah sektor penyedia air bersih, pengolahan dan garment masing-masing sebesar Rp 1, 323,000 s/d Rp 1,725,000. Kedua sektor tersebut mempunyai rata-rata upah dibawah UMK yang berlaku yaitu sebesar Rp. 2,055,000. Sektor-sektor usaha hasil survei dapat diklasifikasikan berdasarkan analisis Klassen Tipology yang hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tipologi Sektor Usaha Hasil Survei Berdasarkan Upah dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019

	Upah Tenaga Kerja	
	$k_{ik} < k_{ip}$	$k_{ik} > k_{ip}$

Jumlah tenaga kerja	$r_{ik} < r_{ip}$	<u>Kuadran II:</u> Real Estate, Industri Manufaktur, Garment	<u>Kuadran I:</u> Meubel/Furniture, dan Industri Makanan Kecil
	$r_{ik} > r_{ip}$	<u>Kuadran III:</u> Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/ Pengolahan	<u>Kuadran IV:</u> Sektor Jasa-Jasa, Otomotif, Penyedia Air Bersih

Sumber: Data Survei Dinas Tenaga Kerja, 2014-2019

Berdasarkan hasil analisis KlassenTipology terhadap upah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang tahun 2019 sebagaimana pada tabel diatas, sektor yang dikategorikan sebagai sektor prima (Kuadran I) sebagai sektor dengan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja tinggi yaitu sektor usaha Meubel/Furniture, Garment dan Industri Makanan Kecil. Sementara itu, sektor Real Estate, Industri Manufaktur termasuk ke dalam sektor sektor dengan kesejahteraan rendah dan penyerapan tenaga kerja tinggi (kuadran II). Sebanyak dua sektor di Kabupaten Semarang tergolong ke dalam sektor dengan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja rendah (kuadran III), yaitu: sektor Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/ Pengolahan. Sektor yang tergolong ke dalam sektor dengan kesejahteraan tinggi dan penyerapan tenaga kerja rendah (kuadran IV) adalah sektor Sektor Jasa-Jasa, Otomotif, Penyedia Air Bersih

**Hasil Pengujian Rata-Rata Perbandingan
Upah dan Jumlah Tenaga Kerja per
Tipologi Sektor Usaha
di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2019**

KUADRAN	N	TENAGA KERJA			UPAH	
		Mean	SD	ρ	Mean	SD
Kuadran I: Meubel/Furniture, Garment dan Industri Makanan Kecil	105	1353	840	0.000	829.270	380.378
Kuadran II: Real Estate, Industri Manufaktur	114	1234	1377		785.510	237.612
Kuadran III: Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/ Pengolahan	43	87	77		785.510	237.612
Kuadran IV: Sektor Jasa-Jasa, Otomotif, Penyedia Air Bersih	32	82	123		861.400	282.910
Total	294	395	770		772.290	314.342

Sumber: Diolah dari Data Survei Dinas Tenaga Kerja, 2014-2019

Analisis Penentuan Sektor dan sub Sektor Potensial

Analisis penentuan sektor potensial merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Sektor potensial yaitu sektor ekonomi yang mempunyai potensi peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Sektor yang berada di Kuadran I berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja tinggi yang meliputi Meubel/Furniture, Garment dan Industri Makanan Kecil. Sedangkan Real Estate dan

Industri Manufaktur yang berada dalam kuadran II berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor-Sektor yang berada dalam kuadran III adalah Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/Pengolahan. Sektor-sektor yang berada dalam kuadran IV yang meliputi sektor Jasa-Jasa, Otomotif, Penyedia Air Bersih. Industri tekstil dan produk tekstil (garment) (TPT) dapat menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Semarang pada era ASEAN Economic Community (AEC) yang sudah digulirkan sejak tahun 2015 mendatang. AEC menjadi momen yang harus dimanfaatkan sehingga tidak menjadi pasar potensial bagi negara lain. Sektor usaha garment dan tekstil pada saat ini masih sangat potensial dalam menghadapi lingkungan persaingan global, karena upah sudah sesuai UMK, dan industri ini membuka peluang lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Namun demikian, industri TPT masih menghadapi sejumlah isu penting, mulai dari masalah ketenagakerjaan, tarif energi, hingga regulasi yang menghambat daya saing (Kemenperin, 2014). Industri TPT adalah sektor padat karya yang telah menyerap banyak tenaga kerja. Tuntutan kenaikan upah minimum yang diikuti dengan demonstrasi dan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan menyebabkan terjadinya relokasi sejumlah pabrik ke daerah lain yang dinilai lebih kondusif. Selain itu, industri TPT harus waspada karena selama ini pasar ASEAN belum tergarap dengan baik. Di samping itu, persaingan bisnis di antara negara ASEAN juga semakin ketat. Total populasi di ASEAN kurang lebih sebanyak 640 juta

jiwa, sementara Indonesia memiliki kurang lebih 250 juta penduduk (Kemenperin, 2017: 2), jika industri ini tidak mampu bersaing maka kompetisi pada era *free trade* negara ASEAN, Indonesia hanya akan menjadi sasaran pasar bagi komunitas ASEAN tersebut. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan industri ini, tidak hanya mengandalkan biaya produksi dengan tenaga kerja yang murah namun harus lebih mengedepankan kualitas produk dan desain yang kompetitif sehingga dapat mengembangkan ekspor ke negara lain. Sampai saat ini ini gaung AEC belum begitu menggembirakan bagi persaingan pasar Indonesia, oleh sebab itu tenaga kerja Indonesia harus dipacu untuk lebih produktif dan bekerja keras dalam menghasilkan produk-produk berkualitas.

Selain industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri real estate, pengolahan makanan kecil sangat potensial dalam menghadapi lingkungan persaingan global di era *Asean Economic Community* (AEC) ini. Industri ini selain didukung oleh sumberdaya wilayah yang luas, juga didukung ketersediaan sumberdaya bahan baku di sektor pengolahan makanan ringan. Hal ini mengingat Kabupaten Semarang lebih didukung oleh kondisi wilayah luas dan struktur tanah yang memadai, sehingga keberadaan industri real estate dan pengolahan makanan dapat berkembang secara potensial di Indonesia, khususnya Kabupaten Semarang. Banyak perusahaan yang berdiri di kabupaten Semarang, pada tahun 2019 sebanyak 1024 perusahaan di Kabupaten Semarang yang sebagian besar bergerak di bidang industri manufaktur, garment dan berusaha retail. Produk

olahan makanan yang menjadi produk lokal Kabupaten Semarang seperti: susu, dendeng, abon, gula kelapa, gula aren, *nata de coco*, ceriping pisang, ceriping tela, sari kedelai, minuman instan, jamu, kopi bubuk, sosis, bakso dan makanan ringan lainnya juga tersedia dan tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Semarang (Kurniati, 2013).

Selain beberapa sektor di atas, sektor Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/ Pengolahan, perminyakan tetap dapat potensial dalam memberikan tingkat upah yang lebih tinggi. Namun sektor ini tidak banyak menyerap tenaga kerja yang besar. Sektor jasa potensial adalah seperti Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/ Pengolahan. Industri retail BBM perlu meningkatkan kesejahteraan karyawan jika ingin bersaing dalam pasar global. Industri ritel BBM di Indonesia khususnya Kabupaten Semarang dapat dikatakan memiliki potensi yang cukup besar sehingga ancaman pendatang baru termasuk tinggi. Dalam pasar bebas, Sekurang-kurangnya terdapat 141 perusahaan asing yang siap meramaikan bisnis hilir migas, seperti: *Shell, Petronas, Exxon Mobil, Caltex/Chevron Texaco, TOTAL, Gulf Oil, British Petroleum, dan Mobil Oil* (Pertamina, 2010). Masuknya Petronas & Shell pada Tahun 2006 membuat praktek monopoli penjualan BBM oleh Pertamina di Indonesia berakhir. Industri ritel BBM (SPBU) lokal untuk dapat mempertahankan daya saing melalui inovasi, efisiensi, dan efektifitas dalam kegiatan usahanya. Pada saat ini, munculnya pendatang baru tersebut belum menjadi ancaman perusahaan, namun

dalam pasar bebas dapat menjadi ancaman serius karena kemampuan modal yang dimiliki. Kedatangan beberapa pemain baru ini memberikan tantangan bagi Industri ritel BBM (SPBU) lokal yang segera memperbaiki diri dari kualitas pelayanan dan kesejahteraan karyawan.

Sektor Jasa-Jasa, Otomotif, Penyedia Air Bersih juga masih potensial dikembangkan di kabupaten Semarang, walaupun memiliki kontribusi rendah dari upah dan tenaga kerja. Jasa logistik, jasa asuransi, kontraktor, perdagangan umum, jasa penyaluran tenaga kerja, resto, bengkel, jasa keuangan mikro, jasa kesehatan yang mencakup jasa rumah sakit, perawat dan lainnya. Selain itu, sektor pariwisata melalui agen travel, hotel, restoran, pemandu wisata, dan lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan di Kabupaten Semarang. 2013). Namun sektor jasa merupakan sektor usaha yang rentan terhadap persaingan di Pasar Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade). Seperti jasa keperawatan, selama ini jasa keperawatan untuk perawat asing profesional hanya diizinkan sebagai pelatih atau konsultan dan tidak dapat memberikan jasa keperawatan langsung kepada pasien (Nurul, 2013). Di bidang penyedia air bersih Kabupaten Semarang memiliki lereng Gunung Ungaran, namun dari segi manajemen masih perlu dilakukan optimalisasi pemberdayaannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: Hasil klasifikasi sektor

ekonomi dengan menggunakan analisis *Klassen Typology* menunjukkan bahwa sektor meubel/furniture, dan industri makanan kecil merupakan sektor ekonomi yang mempunyai potensial dalam memberikan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Sektor ekonomi yang mempunyai upah tenaga kerja tinggi namun penyerapan tenaga kerja rendah adalah: Real Estate, Industri Manufaktur, Garment. Sektor ekonomi yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja tinggi namun upah rendah adalah sektor Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/ Pengolahan. Sektor ekonomi yang mempunyai upah dan penyerapan tenaga kerja rendah adalah sektor jasa-jasa, otomotif, penyedia air bersih

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. Sektor potensial yaitu sektor ekonomi yang mempunyai potensi peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Sektor yang berada di Kuadran I berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja tinggi yang meliputi sektor usaha meubel/furniture, dan industri makanan kecil. Sektor Real Estate, Industri Manufaktur, Garment yang berada dalam kuadran II berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor-sektor yang berada di kuadran III meliputi Percetakan, Perbankan dan Usaha Barocare/ Pengolahan. Sektor-sektor yang berada dalam kuadran IV yang meliputi sektor sektor jasa-jasa, otomotif, penyedia air bersih

Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena belum memasukkan semua sektor seperti sektor pertanian, bangunan dan industri galian sebagai bagian sektor usaha di Kabupaten Semarang, serta sampel usaha hanya pada perusahaan di sektor formal sehingga potensi sektor pertanian dan usaha non formal tidak teridentifikasi perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan kesejahteraan tenaga kerja. Kedua, penelitian ini hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja per unit usaha dan upah berdasarkan UMK, sehingga jumlah unit usaha dalam satu sektor/ sub sektor belum masuk dalam analisis. Hal tersebut menjadi rekomendasi penelitian akan datang untuk memasukkan beberapa variabel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbache, J. S. 2001. *Wage differentials in Brazil: Theory and Evidence*. Journal of Development Studies, 38, 109–130
- Ayers, A. D. 2005. *Industrial Research Institute's R&D Trend Forecasts for 2005*. Research Technology Management, January – February, 18–22.
- Bank of America Merrill Lynch Global Research Estimates, 2014
- Brakman, S., and C. van Marrewijk. 2009. *Introduction: Heterogeneity at Different Spatial Scales*. Journal of Regional Science 49(4): 607-615.
- Brakman, S., R. Inklaar, and C. van Marrewijk. 2013. *Structural Change in OECD Comparative Advantage*. Journal of International Trade and Economic Development 22(6): 817-838.
- Cho, D. S. and Moon, H. C. 2000. *From Adam Smith to Michael Porter*, Singapore: World Scientific.
- Cho, D.S., Moon, H.C. 2000. *From Adam Smith to Michael Porter, evolution of competitiveness theory*. World Scientific Publishing Co.
- Cho, D.S., Moon, H.C., Kim, M.I. 2007. *Characterizing International Competitiveness in International Business Research: a MASI Approach to National Competitiveness*. Research in International Business and Finance 22(2), 175-192.
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan di Kabupaten Semarang. 2013. Hasil Survei Data Upah, Jumlah Tenaga Kerja Dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- Drahokoupil, J. dan Piasna, A. 2017. *What drives wage gaps in Europe?*. Working Paper European Trade Union Institute .04.
- Du Caju P., Lamo A., Poelhekke S., Kátay G. and Nicolitsas D. 2010. *Inter-industry wage differentials in EU countries: what do cross-country time varying data add to the picture?*. Journal of the European Economic Association, 8(2-3), 478-486.
- Dwi. Edi. K. 2013. *Factors Which Influence The Decision Of Rural Farmer To Work In Industrial Sector Beside In Agricultural Sector – Semarang Regency (Central Java Province - Indonesia)*. Study case. International Journal of Agricultural Economics and Extension1 (1): 001-

- 009.
- Griffin ML, Hogan NL, Lambert EG, Tucker-Gail KA & Baker DN. 2010. *Job Involvement, Jobstress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment and The Burnout of Correctional Staff*. *Criminal Justice and Behavior* 37(2): 239–255.
- Kemenperin. 2014. *Mengukur Kesiapan Industri Nasional Jelang AEC 2015*. Majalah Industri Edisi II, Jakarta.
- Magda I., Rycx F., Tojerow I. and Valsamis D. 2008. *Wage Differentials Across Sectors in Europe: An East-West Comparison*, IZA Discussion Paper 3830. Bonn, Institute for the Study of Labor.
<http://econpapers.repec.org/paper/izaizadps/dp3830.htm>.
- Martins P. S. 2004. *Industry Wage Premia: Evidence from The Wage Distribution*. *Economics Letters*, 83(2), 157-163.
- Nurul, Z. 2013. *Persaingan Sektor Jasa di Pasar Bebas ASEAN Bakal Ketat*. Artikel diakses secara online pada 14 September 2014 di <http://www.merdeka.com/uang/persaingan-sektor-jasa-di-pasar-bebas-asean-bakal-ketat.html>.
- Pertamina. 2010. *Bangun Jaringan Merangkul Swasta*. Warta Pertamina April, 2010.
- Porter. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. *Harvard Business Review* 68, 2 (March–April 1990): 73–93.
- Robinson J. and Eatwell J. 1973. *An Introduction to Modern Economics*. London: McGraw-Hill.
- Rycx F. and Tojerow I. 2007. *Inter-industry wage differentials: what do we know?*, *Reflets et perspectives de la vie économique*. XLVI(2-3), 13-22.
- Rycx, F. 2003. *Industry wage differentials and the bargaining regime in a corporatist country*. *International Journal of Manpower* 24(4), 347-366.
- Rycx, F., Lallemand, T., Plasman, R. 2005. *Why do large firms pay higher wages? Evidence from matched worker-firm data*. *International Journal of Manpower* 26(8), 705-723
- Schumpeter, J. A. 1983. *The Theory of Economic Development*. New Brunswick, NJ, USA: Transaction Publishers.
- Silva, J.R., & Guimarães, C.R.R.F.C. 2017. *Wage Differentials in Brazil: Tourism vs. Other Service Sectors*. *Cogent Economics & Finance*, 5: 1-17.
- Slichter, S. 1950. *Notes on The Structure of Wages*. *Review of Economics and Statistics* 32, 80-91.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Adhi Budi Susilo¹, Tri Nurhayati² dan Anas Sa'bani³

¹*Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo
Jl. Diponegoro N0.186 Ungaran 50513*

²*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisono Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Kota Semarang 50185*

³*Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Kota Semarang 50232*

Email: *adhibudisusilosh@gmail.com*¹, *trinurhayati.wali9@gmail.com*²,
*anas.peradi@gmail.com*³

ABSTRAK

Sejak dimunculkannya Inpres Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan e-Government dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan komunikasi dan informasi berada dalam kelompok. Maka dengan itu untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan penelitian adalah memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan

Hasil penelitian sistem pemerinatahan berbasis elektronik kiranya dapat menjadi solusi integrasi yang efektif. Kabupaten Semarang sudah menggunakan digitalisasi pelayanan untuk menunjang tugas-tugasnya namun belum bisa terlaksana secara optimal diantaranya pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan oleh masyarakat, dikarenakan masih ada kesenjangan digital menuju demokrasi digital dan manual berbasis dokumen menuju pemerintahan online faktor yang menjadi penghambat diantaranya komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Sebagai salah satu jembatan kepentingan publik untuk dilayani sesuai dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Semarang.

Kata Kunci: *Perkembangan Ekonomi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektionik, Pelayanan Publik Kabupaten Semarang*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi fungsi pemerintahan juga ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum. Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Digitalisasi sistem pemerintahan ini, adalah salah satu cara untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima. Penerapan SPBE secara optimal akan berdampak pada integrasi sistem sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, harus mendukung akselerasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.

Pemanfaatan atau pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi

pemerintah khususnya instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, dengan berjalannya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini maka diharapkan seluruh aktivitas organisasi pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah fungsi kebijakan dan pelayanan, dalam pelaksanaannya konsep ini merupakan tanggung jawab bersama, artinya bukan hanya pemerintah saja tetapi juga peran serta masyarakat

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, di Kabupaten Semarang mulai efektif sejak Tahun 2016 di bawah pengelolaan Dinas Kominfo Kabupaten Semarang sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Semarang. Di Tahun 2016 inilah pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik mulai berjalan efektif sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh penyelenggara sistem teknologi informasi dan akan sangat menentukan keputusan mereka untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan kegiatan ekonomi dan administrasi mereka. Ini sesuai dengan kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan

sistem pemerinatahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-government*.⁷³

Wujud nyata dari sistem pemerinatahan berbasis elektronik telah dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya dengan munculnya Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017. merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan sistem pemerinatahan berbasis elektronik secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah juga sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang.

2. Perumusan Masalah

Setiap instansi pemerintahan kini telah memiliki *website* resmi dalam upaya keterbukaan informasi publik. Informasi-informasi yang disampaikan dalam *website* resmi seharusnya dapat diakses oleh setiap masyarakat sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pencarian informasi publik yang dibutuhkan. Berdasarkan hal diatas perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pendukung perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Semarang.

3. Tinjauan Pustaka

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan suatu keharusan dan tuntutan zaman, untuk itu diperlukan suatu solusi yaitu keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi *on-line* antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Perubahan lingkungan strategis (LINGSTRA) dan kemajuan teknologi mendorong aparat pemerintah mengantisipasi paradigma baru untuk peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan agar terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

Sektor teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran yang begitu besar di setiap negara. Kehadiran teknologi telah membuat hilangnya sekat penghalang untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Setiap instansi pemerintahan kini telah memiliki *website* resmi dalam upaya keterbukaan informasi publik. Informasi-informasi yang disampaikan dalam *website* resmi akan selalu *diupdate* oleh setiap instansi yang bersangkutan. Sehingga hal ini

⁷³<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/babak-baru-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik>

mempermudahkannya masyarakat dalam pencarian informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor instansi tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud dari *electronic government (e-govemmentf)*. *e-Government* memberi kemudahan bagi warga masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah. Sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya dan peningkatan transparansi dalam upaya pengurangan korupsi di dalam pemerintahan.⁷⁴ Berdasarkan pemahaman di atas, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dan pengembangan *e-Government* yaitu kelembagaan, infrastruktur dan sumberdaya manusia agar mampu mendukung pemanfaatan *e-Government*. Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.⁷⁵

a) Komunikasi (*communications*)

Hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara

timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan".

b) Ketersediaan sumberdaya (*resources*)

Hal ini berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- 1) Sumber daya manusia : merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
- 2) Informasi : merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
- 3) Kewenangan : hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan

⁷⁴ (indwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-danpengaruhmediasosial)

⁷⁵ Juliartha, Edward. Model Implementasi Kebijakan Publik. [Jakarta: Trio Rimba Persada, 2009

pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

- 4) Sarana dan prasarana : merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
 - 5) Pendanaan : membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- c) Sikap dan komitmen dari pelaksana program

Hal ini berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

d) Struktur birokrasi

Hal ini berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Dari berbagai variabel di atas terlihat bahwa komunikasi dan informasi menjadi bagian penting yang dari berhasilnya pencapaian tujuan negara, sekaligus terwujudnya pemerintahan yang baik. Komunikasi dan informasi menjadi faktor determinan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel yang benar. Oleh karenanya, keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan⁷⁶, Bahkan audit keuangan maupun kebijakan pemerintah. Pengawasan dan penilaian yang diberikan pada masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan menyatakan pendapat sebagai salah satu ciri negara hukum, baik *rechtstaat* maupun *the rule of law*.⁷⁷

Dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

⁷⁶ Hamzah Halim, Jakarta, Prenamedia 2015

⁷⁷ Bayu Dwi Anggono, Jakarta, Konstitusi Press, Jakarta 2014

Hal ini dikuatkan dengan RPJMN 2015-2019, yang menyebutkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan

pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-Government* yang mengatur kelembagaan *e-Government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-Government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik;

pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

4. Tujuan Penelitian

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang guna meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas sebagai salah satu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pendukung perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Semarang
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Semarang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* belum disesuaikan dengan kondisi aktual. Dimana tahapan pengembangan *e-Government* dibagi dalam 3 tahap yaitu:

- 1) Tahap Persiapan, yaitu pembuatan situs web pemerintah disetiap lembaga, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penyediaan sarana akses publik, sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, pengembangan motivasi kepemimpinan dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government*, serta penyiapan perangkat peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Tahap Pematangan, yaitu pembuatan situs informasi layanan intraktif serta antarmuka untuk berhubungan dengan lembaga lain.
- 3) Tahap Pemantapan, yaitu penyediaan fasilitas transaksi pelayanan publik secara elektronik serta penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain.

Kabupaten Semarang memang telah menerapkan berbagai bentuk digitalisasi baik dalam pelayanan maupun kinerjanya. Berbagai jenis sistem pemerintahan berbentuk aplikasi dan fitur – fitur pengembangan telah digunakan untuk menunjang dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di bidang administrasi. Meskipun sudah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam kegiatan pemerintahannya, namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih harus bergantung pada sumber daya fisik. Hambatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Semarang yaitu *website* pemerintah Kabupaten masih

berada pada tingkat persiapan apabila ditinjau dari sejumlah aspek yaitu:

- (1) *E-Leadership*: prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
- (2) Infrastruktur Jaringan Informasi: kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses
- (3) Pengelolaan Informasi: kualitas dan keamanan pengelolaan informasi
- (4) Lingkungan Bisnis: kondisi pasar, sistem perdagangan. dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi
- (5) Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan .

Berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di antaranya adalah kurangnya infrastruktur yang ada, masalah sumber daya manusia dan lain-lain. Karena penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah menjadi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan juga tuntutan penerapan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Semarang harus segera menerapkannya dengan segala keterbatasan yang ada, terdapat empat prinsip dasar yang perlu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, keterbukaan,

akuntabilitas, dan profesionalitas untuk peningkatan layanan dan pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini tiga faktor yang menyebabkan pentingnya *e-Government* dalam pembangunan masyarakat jaringan (*network society*) belum terpenuhi:

1. Elektronisasi komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk baru partisipasi dan interaksi keduanya. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat, disamping tingkat kenyamanan pelayanan juga semakin tinggi. Di samping itu bentuk transaksi baru ini akan menyebabkan tingginya tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
2. *Cyberspace* dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik pelayanan yang berbelit-belit. Tujuan realistis yang hendak dicapai melalui *cyberspace* adalah efisiensi pelayanan dan penghematan finansial. Disamping itu, informasi online dalam pelayanan publik dapat meningkatkan derajat pengetahuan masyarakat mengenai proses dan persyaratan sebuah pelayanan publik
3. *e-Government* menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat. Penggunaan internet dalam sektor publik akan memungkinkan kemampuan kompetisi masyarakat lokal dengan perkembangan internasional dan global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Semarang sudah menggunakan sistem berbasis elektronik untuk menunjang tugas-tugasnya, namun belum bisa terlaksana secara optimal dan belum bisa memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat yang merupakan salah satu indikator penting dalam memaksimalkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Semarang
2. Kendala yang di hadapi dalam penerapan sistem berbasis elektronik di Kabupaten Semarang terletak pada komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Komunikasi dianggap menjadi penghambat penerapan sistem berbasis elektronik karena 3 dimensi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi tidak dapat terlaksana dengan baik. Dari faktor sumberdaya disebabkan karena kurangnya kualitas sumberdaya manusia, disebabkan karena pemahaman dan pengetahuan pegawai yang kurang terkait dengan kebijakan sistem berbasis elektronik

Saran

1. Memberi ruang dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai proses pelayanan publik yang ada menjadi pelayanan berbasis elektronik berbasis sistem informasi.

2. Penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dalam

rangka memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Dwi Anggono. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Hamzah Halim. 2015. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Prenamedia.

Juliarta, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/babak-baru-sistem-pemerintahan-berbasis-elektron>
indiwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-danpengaruhmediasosial

**UJI MODEL PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH MELALUI *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN
(STUDI PADA OPD KABUPATEN SEMARANG)**

Lisa Erfi Yunita dan Agung Wibowo

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Kampus I : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang 50233. Telp. (024)8316187 Fax.
(024)8316193*

Kampus II : Jl. Imam Bonjol No.161. Tel. (024) 3510803 Semarang 50131

Email: lisayunita73@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *simple random sampling*. Populasi penelitian ini adalah 45 instansi OPD Kabupaten Semarang dengan unit penelitian yaitu pegawai bagian akuntansi/ keuangan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Kabupaten Semarang. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Kabupaten Semarang.

Kata Kunci : *Governance, Teknologi, Pengendalian Intern, Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2008: 2). Berdasarkan hal tersebut dalam rangka memperkuat akuntabilitas, setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan. Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Darise, 2008: 2).

PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia (Haryanto, dkk., 2007: 261).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 s.d. 2016 Kabupaten Semarang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menggambarkan entitas pemerintah daerah yang baik dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Elvira, 2011). Menurut penelitian Karmila, dkk. (2014) bahwa pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari pemanfaatan teknologi, karena pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human error*. Selain itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa *good*

governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Elvira, 2011) yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Ika dan Nur, 2015). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Fadila, 2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian (Warih, 2015). Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Dian dan Akhmad, 2014) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian (Karmila, dkk., 2015) bahwa pengendalian intern berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, begitu pula dengan hasil penelitian (Siti, dkk., 2017) yang menyatakan teknologi informasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap informasi laporan keuangan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan apakah *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan pada OPD Kabuapten Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain *good governance*, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian intern.

1. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Demi hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, dan bertanggungjawab. Adanya penerapan *good governance*, maka diharapkan pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk dari penyelenggaraan anggaran dan tujuan

pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara *good governance* dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Elvira (2011) dan Ika dan Nur (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan *good government governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan *good governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada OPD Kabupaten Semarang).

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut ITTA (*Information Technology Association of America*), teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human error*. Teknologi informasi, khususnya komputer digunakan sebagai pendukung pembuatan laporan keuangan, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pada penjelasan tersebut diduga terdapat hubungan positif antara penggunaan teknologi informasi dan kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya penelitian Warih (2016) dan Karmila, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

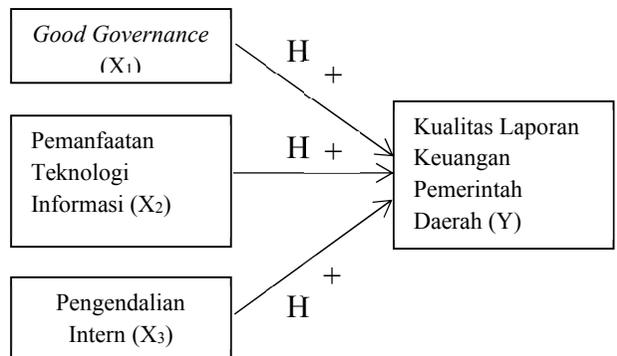
H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada OPD Kabupaten Semarang).

3. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut, sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pemerintah daerah dituntut untuk

memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika tidak ada sistem akuntansi yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern (*internal control*) pemerintah daerah, sehingga sistem pencatatan dan pelaporan akuntansinya kurang handal. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Fadila (2013) dan Warih (2016) menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh positif signifikan pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada OPD Kabupaten Semarang). Berdasarkan uraian kerangka pemikiran pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka diringkas dalam dalam gambar di bawah ini :



Uji Model Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang yang berjumlah 45 instansi OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik survei dengan bantuan kuesioner sejumlah 100 kuesioner yang dibagikan. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ keuangan pada OPD Kabupaten Semarang yang berjumlah 100 pegawai, dan data yang terkumpul sebanyak 82 kuesioner.

2. Variabel dan Pengukuran Variabel

a. *Good Governance* (X₁)

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,

dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 24). Variabel *good governance* diukur dengan Skala Likert lima poin, yaitu skor 1 (Sangat Tidak Setuju) yang mengindikasikan bahwa responden menilai adanya pencapaian *good governance* sangat rendah, sedangkan skor 5 (Sangat Setuju) mengindikasikan bahwa responden menilai adanya pencapaian *good governance* yang sangat tinggi. Variabel *good governance* (X1) dioperasionalkan dengan 10 indikator yang mengacu pada penelitian Elvira (2011), yaitu terdiri dari :

1. Keterbukaan
2. keuangan
3. Pengambilan keputusan yang demokratis
4. Kebebasan pers
5. Kebebasan berpendapat
6. Keterlibatan masyarakat
7. Menilai pertanggungjawaban Pelaporan

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂)

Menurut ITTA (*Information Technology Association of America*), teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Pemanfaatan teknologi membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human eror*.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik (Karmila, dkk., 2015).

Variabel penggunaan teknologi informasi (X₂) diukur menggunakan Skala Likert lima poin. Skor 1 (Sangat Tidak Setuju) mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi tergolong sangat rendah, sedangkan skor 5 (Sangat Setuju) mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi tergolong sangat tinggi. Variabel ini dioperasionalkan dengan menggunakan delapan indikator yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) yang terdiri dari :

1. Kecukupan jumlah komputer yang ada dan tersedia.
2. Jaringan internet sudah terpasang dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.
3. Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi.
4. Pegawai Pemerintahan mampu membuat laporan keuangan secara komputerisasi.
5. Adanya software pendukung.
6. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
7. Adanya perbaikan peralatan tepat waktu.

c. Pengendalian Intern (X₃)

PP No. 60 Tahun 2008, bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Variabel pengendalian intern (X3) diukur menggunakan Skala Likert lima poin. Skor 1 (Sangat Tidak Setuju) mengindikasikan bahwa adanya pengendalian intern yang sangat rendah, dan skor 5 (Sangat Setuju) mengindikasikan adanya pengendalian intern yang sangat tinggi. Variabel ini dioperasionalkan dengan menggunakan sembilan indikator yang mengacu pada penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, diantaranya :

1. Sistem akuntansi yang ada.
2. Adanya dokumen pendukung.
3. Adanya otorisasi pihak yang berwenang.
4. Adanya bukti transaksi yang sah.
5. Pencatatan pembukuan.
6. Catatan akuntansi up to date.
7. Adanya review dan persetujuan laporan keuangan.
8. Sistem akuntansi yang memungkinkan audit.
9. Adanya pemisahan tugas.
10. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

(Darise, 2008: 49). Laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala Likert lima poin, dimana skor 1 (Sangat Tidak Setuju) yang mengindikasikan bahwa responden mengungkapkan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memiliki kualitas sangat buruk, sedangkan skor 5 (Sangat Setuju) yang mengindikasikan bahwa responden mengungkapkan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sangat baik. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dioperasionalkan dengan 7 indikator yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008). Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Penyajian setiap fakta informasi dalam laporan keuangan secara jujur.
2. Penyajian informasi dalam laporan keuangan yang dapat diverifikasi.
3. Penyajian informasi dalam laporan keuangan yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.
4. Peraturan Menteri Keuangan Badan Layanan Umum yaitu berkaitan dengan penyajian Neraca.

5. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
6. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.
7. Adanya Rekonsiliasi secara periodik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas menggunakan *Corrected Item – Total Correlation* dengan alat bantu program SPSS, yaitu dengan membandingkan r tabel dan r hasil. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam taraf 95% atau $\alpha = 0,05$. Apabila nilai $r_{\text{hasil}} > r_{\text{tabel}}$ maka instrumen tersebut dinyatakan valid, r_{tabel} untuk $N=82$ adalah 0,217. Hasil pengujian dapat dilihat nilai terendah *Corrected Item – Total Correlation* dari masing-masing instrumen. *Good governance* nilai terendah 0,281, pemanfaatan teknologi informasi nilai terendah 0,441, pengendalian intern nilai terendah 0,234, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah nilai terendah 0,630.

Uji Reliabilitas

Pengujian terhadap item-item yang valid menggunakan alat ukur dengan teknik uji reliabilitas *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen yang dikatakan reliabel lebih besar dari 0,6. Hasil penelitian menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel *good governance* 0,780, pemanfaatan teknologi informasi 0,870, pengendalian intern 0,861, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 0,912.

2. Uji Non Respon Bias

Uji non respon bias dilakukan dengan tujuan untuk menguji adanya persamaan/perbedaan jawaban antara kuesioner yang terkumpul dengan kuesioner yang tidak kembali. Uji ini dilakukan menggunakan *Independent Sample T-Test* dengan melihat bahwa nilai *Sig. (2-tailed) > 0,05*. Hasil uji non respon bias dengan asumsi nilai varians sama variabel *good governance* nilai *Sig. (2-tailed) 0,147*, pemanfaatan teknologi informasi 0,560, pengendalian intern 0,664, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 0,786. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jawaban kuesioner yang terkumpul dengan jawaban yang tidak terkumpul.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan memperhatikan signifikansi uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov Test* $> \alpha = 0,05$ didapat hasil nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) 0,218*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data terdistribusi dengan normal.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance > 0,10*. Hasil penelitian didapat nilai *tolerance* variabel *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10, maka data-data dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Good Governance	.688	1.454
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.585	1.708
Pengendalian Intern	.555	1.801

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Sumber : Data yang telah diolah, 2018

Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara melihat adanya heterokedastisitas adalah dilakukan uji *Glejser*, apabila nilai Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari hasil pengolahan data seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Standardized Coefficients				
		Unstandardized Coefficients				
		B	Error Std.	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.673	1.986		.339	.735
	Good Governance	-.047	.070	-.090	-.664	.508
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.057	.055	.152	1.039	.302
	Pengendalian Intern	.015	.061	.036	.242	.809

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data yang telah diolah, 2018

5. Uji Goodness of Fit (Uji Model)

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai R square 0,481 atau 48,1% artinya kemampuan model untuk menjelaskan variabel *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 48,1% sedangkan sisanya 51,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Nilai signifikansi F test adalah 0,000 (sig. < 0,05), dengan demikian model regresi adalah fit sehingga layak digunakan sebagai alat analisis

Hasil Uji Goodness of Fit

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 ^a	.481	.461	2.393

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi

6. Uji Hipotesis

Alat untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda *Ordinary Least Square (OLS)* dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) menggunakan program SPSS.

Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.380	3.077		1.423	.159
	Good Governance	.342	.109	.310	3.146	.002
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.050	.086	-.062	-.579	.564
	Pengendalian Intern	.449	.094	.521	4.755	.000

a. Dependent Variable: Kualitas

Sumber : Data yang diolah, 2018

Berdasarkan pengolahan data dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda, yaitu :

$$Y = 4,380 + 0,342X_1 - 0,050X_2 + 0,449X_3 + e$$

a. Hipotesis 1

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai signifikansi variabel *good governance* (X_1) $0,002 < \alpha 0,05$ dan nilai $\beta_1 = 0,342$ bertanda positif. Dapat disimpulkan bahwa *good governance* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Hipotesis 2

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) sebesar $0,564 > \alpha 0,05$ dan nilai $\beta_2 = (-0,050)$ bertanda negatif. Dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X_2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan pernyataan tersebut maka H_0 diterima dan H_2 ditolak.

c. Hipotesis 3

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai signifikansi variabel pengendalian intern (X_3) $0,000 < \alpha 0,05$ sedangkan nilai $\beta_3 = 0,449$ bertanda positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian intern (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan pernyataan tersebut maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *good governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Semarang. Artinya semakin baik penerapan *good governance*, maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Adanya *good governance* dilihat dari penerapan prinsip pengelolaan daerah yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan atas pengelolaan keuangan daerah dengan cara publikasi laporan keuangan tahunan secara rutin agar publik dapat mengetahui kinerja yang telah dicapai dan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Selain itu, juga didukung dengan adanya prinsip responsibilitas yakni adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang telah disusun sebelumnya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga terwujudnya kualitas LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diaudit oleh inspektorat wilayah Kabupaten Semarang yang kemudian setiap tahunnya akan diaudit oleh BPK RI perwakilan Jawa Tengah untuk

mendapatkan opini atas LKPD satu periode pelaporan akuntansi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin (2015) dan penelitian Siti Nurohmi, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis kedua diperoleh hasil bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Semarang. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan penggunaan teknologi informasi tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan secara tidak signifikan.

Teknologi informasi khususnya komputer, digunakan sebagai pendukung pembuatan laporan keuangan agar terbebas dari kesalahan material yang disebabkan *human error*, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien. Namun, pada hasil penelitian ini variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak sejalan dengan teori tersebut sehingga tidak berakibat pada meningkatnya kualitas laporan keuangan. Hal tersebut karena teknologi informasi yang ada di beberapa kantor dinas belum dimanfaatkan secara optimal serta beberapa pegawai bagian akuntansi kurang

memahami penggunaan software data transaksi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Tri Anggraeni dan Akhmad Riduwan (2014) yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.

c. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, dapat dinyatakan bahwa variabel pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada OPD Kabupaten Semarang. Hal tersebut berarti semakin tinggi kepatuhan OPD dalam pengendalian intern, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Pengendalian intern memiliki pengaruh paling besar dalam model penelitian ini, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang paling tinggi diantara ketiga variabel independen yaitu 0,449 sehingga adanya pengendalian intern yang baik berpengaruh besar dalam peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Semarang.

Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu tugas dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Komponen pengendalian intern akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pengendalian intern (*internal control*) pemerintah daerah yang kuat, akan menghasilkan sistem

pencatatan yang valid dan pelaporan akuntansi yang handal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadila Ariesta (2013) dan penelitian Warih Komarasari (2016) yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai pengaruh variabel independen yaitu *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap variabel dependen kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Variabel pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan kinerja *good governance* dan pengendalian intern pada OPD Kabupaten Semarang, sehingga akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang lebih baik dan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Tengah.
2. Penyediaan sarana teknologi informasi lebih optimal dan pegawai bagian akuntansi lebih memahami penggunaan software data transaksi keuangan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian Tri dan Akhmad Riduan. 2014. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 3, No.3.
- Ariesta, Fadila. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)*. Jurnal Akuntansi.
- Azlim. Darwanis dan Usman Abu Bakar. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No.1.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multifariate dengan Program IBM SPSS.19*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. Sahmuddin dan Arifudin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- <http://Beta.bandungkab.go.id>public>uplo ads> (9 Oktober 2017).
- <http://eprints.uny.ac.id/19845/3/BAB%20II.pdf> (9 Oktober 2017).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian intern](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern) (15 Oktober 2017).
- <http://Pusat-studi-kebijakan-publik.blogspot.com> (10 November 2017).
- http://Repository.upi.edu/11478/6/S_PEA_1005751_Chapter%203.pdf (15 November 2017).
- <http://Theorymethod.blogspot.co.id/2015/12/uji-goodness-of-fit-uji.html> (4 Desember 2017).
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf> (16 Oktober 2017).

<http://www.spssindonesia.com/2016/08/ca-ra-melakukan-uji-f-simultan-dalam.html>

(04 Desember 2017).

<http://tutorial-spss-statistika.blogspot.co.id>
(25 Februari 2018)

Indriasari, D dan Nahartyo, E. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Simposium Nasional Akuntansi, XI, Pontianak, Juli.

Karmila. Amries Rusli Tanjung dan Edfan Darlis. 2015. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. *Jurnal SOROT*. Vol.9, No.1.

Komarasari, Warih. 2016. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)*. *Jurnal Akuntansi*.

Nurohmi, Siti. Sutrisno & Zaki Baridwan. 2017. *The Determinant of Financial Statements-Content Information: Corporate Governance as a Mediating Variable*. *Journal of Accounting and Business Education*. Vol.1, No.2.

PP No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

PP Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.

Sani, Abdul. 2016. *Implementasi Good Governance pada Pemerintah Daerah*. (Badan Pendidikan dan Pelatihan).Bandiklat.babelprov.go.id>2016/11/30 diakses pada 9 November 2017.

Sari, Ika Maya. Nur Arvah Tamrin. 2015. *Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. hal. 106-121.

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-tujuan-teknologi-informasi.html>.
(01/11/2017).

Zeyn, Elvira. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1.

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA WISATA MELALUI KOPERASI SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA

Fajar Suryatama, Pitaloka Dharma Ayu, Nurmiyati

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI
Sudirman Ungaran, Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur 50514*

Email: fajarsuryatamaundaris@yahoo.co.id

ABSTRAK

Jumlah koperasi di Kabupaten Semarang semakin tahun semakin menurun. Kondisi tersebut disebabkan karena banyak koperasi yang tidak aktif, pada saat mendirikan koperasi cara pendirian dan perizinannya mudah, pola pikir tersebut masih keliru, yaitu tidak berdasarkan atas kesadaran untuk berusaha tetapi hanya untuk memperoleh dana bantuan dari pemerintah dan mereka berfikir dengan menjadi anggota koperasi berarti mudah untuk mendapatkan pinjaman.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data dan metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, pengamatan, wawancara dan FGD (*focus Group Discussion*). Proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan.

Hasil penelitian yang paling utama adalah bagaimana merubah *mindset* pola pikir masyarakat tentang koperasi dari hanya untuk memperoleh dana bantuan dan kemudahan pendiriannya, menjadi mendirikan koperasi karena suatu kebutuhan untuk memperkuat dan memajukan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dalam memaksimalkan potensi desa wisata.

Kata kunci : *Koperasi, Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Desa Wisata.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persoalan kemiskinan dan urbanisasi yang tinggi merupakan masalah klasik bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, alasan kondisi lingkungan desa yang minim tersentuh pembangunan dan kesadaran masyarakat untuk inovasi dan improvisasi masih sangat minim, masyarakat cenderung menunggu uluran tangan pemerintah memberikan bantuan

serta menyalahkan pemerintah atas kondisi yang mereka alami, sehingga membuat kondisi ekonomi masyarakat yang miskin membuat mereka semakin terpuruk. Hal ini semakin bertambah ketika masuk informasi dari kota mengenai kemudahan mencari pekerjaan dan uang yang membuat masyarakat desa berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota-kota. Tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keahlian yang dimiliki serta ketidaksiapan mental menghadapi kondisi perkotaan yang

sangat jauh berbeda dengan desa, justru akan semakin menambah permasalahan di kota seperti meningkatnya angka kemiskinan di kota, angka kriminalitas dan masalah sosial yang lain. Berdasarkan data BPS Kabupaten Semarang Tahun 2017, prosentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang adalah 7,78% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 79.660 orang.. Hal ini menjadi tugas semua pihak untuk berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran agar jumlah penduduk miskin semakin kecil dan hilang.

Solusi mengentaskan kemiskinan dan mencegah urbanisasi harus segera dilakukan, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat desa melalui suatu badan usaha yang memiliki nafas dan jiwa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yaitu kekeluargaan dan gotong-royong.

Dukungan pemerintah dalam memberdayakan koperasi dimanifestasikan melalui program Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Kemenkop dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang secara umum terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu; reformasi koperasi menjadi koperasi sebagai lembaga yang sehat, kuat, teguh dan mandiri. Kedua yaitu pengembangan umum. Program koperasi dari pemerintah tidak hanya dari pembuatan kebijakan saja, tetapi dari masalah pendanaan, pemerintah pada tahun 2018 telah menyiapkan anggaran 1,2 trilliun yang terdiri dari 750 miliar melalui pembiayaan konvensional dan 450 miliar melalui pembiayaan syariah. Tahun 2018 pemerintah memiliki target

untuk menambah 3000 unit koperasi baru yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adanya target diatas tentu saja pemerintah mendukung dengan anggaran dana, kemudahan regulasi dan stimulus untuk pencapaian target tersebut (Ardhyatama, 2018).

Desa yang satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing, setiap desa pasti memiliki potensi yang bisa digarap oleh warganya dengan inovasi dan kreativitas. Potensi-potensi desa wisata tersebut ketika akan di berdayakan oleh masyarakat, maka perlu suatu lembaga yang berbadan hukum agar dikemudian hari tidak terjadi masalah, seperti sengketa kepemilikan atau berhenti operasi karena masalah perijinan. Disini masyarakat bisa memilih badan usaha koperasi dengan alasan mudah cara pendirian dan perizinannya. Pada saat ini minat masyarakat untuk memilih badan usaha koperasi sangat rendah, hal ini bisa dilihat dari jumlah koperasi di kabupaten Semarang yang semakin tahun semakin menurun, hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Jumlah Koperasi di Kabupaten Semarang

Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	700	377	327

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. 2019

Kondisi tersebut disebabkan karena banyak koperasi yang tidak aktif, karena ketika mendirikan koperasi pola pikir masyarakat keliru, yaitu tidak berdasarkan atas kesadaran untuk berusaha tetapi hanya

untuk memperoleh bantuan dari pemerintah, Hal ini yang menyebabkan jumlah koperasi banyak tetapi tidak produktif.

Uraian diatas telah memberikan gambaran secara umum tentang problematika koperasi di Kabupaten Semarang sekaligus adanya solusi masalah untuk pengentasan kemiskinan dan mencegah urbanisasi melalui gerakan koperasi, tetapi implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, diperlukan strategi apa yang harus ditempuh untuk membangkitkan kembali jumlah dan kualitas koperasi melalui pemberdayaan potensi desa di Kabupaten Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “Daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Masyarakat merupakan sekumpulan individu sosial yang saling berinteraksi dan mendiami suatu tempat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (dalam RKPD Kabupaten Semarang 2019). Menurut Winarni (dalam Ambar Teguh, 2004:79) inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Artinya pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada pihak yang belum memiliki daya

atau keterampilan akan tetapi juga bagi pihak yang daya atau keterampilannya masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2015:32) pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat, dari kemandirian tersebut menjadikan masyarakat tidak tergantung akan pemberian.

Potensi Desa

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Di mana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa sendiri terbagi menjadi 2 yakni potensi fisik (tanah, air, manusia, cuaca, ternak) dan potensi nonfisik (aparatur desa, gotong-royong, organisasi desa).

Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti, Wiendu. 1993). Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan secara keseluruhan suasana yang memiliki tema dengan mencerminkan keaslian pedesaan,

baik dari tatanan segi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan adat keseharian yang memiliki ciri khas arsitektur serta tata ruang desa menjadi suatu rangkaian aktifitas pariwisata (Ditjen Pariwisata, 1999).

Koperasi

Definisi Koperasi Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi. Landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada BAB II Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Koperasi memiliki 2 asas, yang pertama yaitu asas kekeluargaan artinya, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Kedua asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya.

Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menerangkan tentang fungsi koperasi, antara lain:

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

1. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

TUJUAN PENELITIAN

Mencari solusi dan metode yang tepat untuk mengatasi semakin menurunnya jumlah koperasi di Kabupaten Semarang, sekaligus meningkatkan jumlah dan kualitas koperasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa, instansi pemerintah, koperasi dan perguruan tinggi yang masuk wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan jangka waktu 3 bulan dimulai bulan Maret sampai Juni 2019.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dan metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, pengamatan, wawancara dan FGD (*focus Group Discussion*). Proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan.

Menurut Bungin (2011), dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif yaitu menganalisis proses berlangsungnya fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial itu. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dijabarkan oleh Creswell (2012), yaitu :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisa.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data, mengolah materi, atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, lokasi, orang-

orang, kategori dan tema-tema yang akan dianalisis.

5. Menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema yang diperoleh dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. (Yunus *et al.*, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110 14'54,75"-110 39'3" Bujur Timur dan 7 30'0" Lintang Selatan dengan luas 95.020,67 Hektar (Ha) atau sekitar 2,29% dari luas provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 208 desa tersebar di 19 kecamatan. Kondisi geografi desa-desa di Kabupaten Semarang yang memiliki kontur yang beragam, mulai dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi berbagai macam destinasi-destinasi wisata baru.

Perkembangan desa wisata terutama di Provinsi Jawa Tengah sudah menunjukkan kemajuan, di Kabupaten Semarang berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0424/2015 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang telah terbentuk 35 desa. Potensi desa wisata di Kabupaten Semarang masih sangat besar, mengingat jumlah desa di Kabupaten Semarang sebanyak 208 desa dan baru terbentuk sebanyak 35 desa wisata, artinya baru 16,82% dari jumlah desa yang ada.

Faktor *mindset*, paradigma atau pola pikir

yang terlanjur melekat dimasyarakat, mempersulit koperasi untuk tumbuh dan berkembang, masyarakat terlanjur memiliki pandangan bahwa koperasi hanya untuk memperoleh bantuan pemerintah dan banyak yang gulung tikar, rugi, tidak relevan dengan perkembangan zaman tanpa melihat latar belakang atau penyebab rugi dan matinya sebuah koperasi. Mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan perubahan *mindset* masyarakat terhadap koperasi dengan cara antara lain:

1. Dukungan dari pemerintah dengan seluruh elemen, misalnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait ketika melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi yang akan melakukan KKN di Kabupaten Semarang dengan mewajibkan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi koperasi kepada masyarakat dimana mereka melakukan KKN.
2. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan juga perlu melakukan inovasi untuk menarik minat masyarakat berkoperasi salah satunya dengan mengadakan Lomba Karya Tulis online melalui website koperasi dengan tema “Memaksimalkan Potensi Desa Wisata Melalui Koperasi”, dimana isi karya tulis memuat potensi desa masing-masing.
3. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan program pelatihan langsung untuk masyarakat umum maupun tidak langsung melalui *website* koperasi yang isinya selalu di *update*.

Pemangku kepentingan di desa seperti aparat desa harus berperan mensukseskan program gerakan koperasi dengan mau mengerti dan memahami seluk-beluk koperasi, sehingga bisa menjadi tangan panjang pemerintah dalam mensosialisasikan gerakan koperasi dan aparat desa lebih dipercaya oleh masyarakat. Peran akademisi (guru dan dosen) serta praktisi (orang yang memiliki keahlian dan pengalaman) koperasi dilakukan melalui pemberian informasi tentang koperasi dengan metode yang menarik dan mudah dipahami serta memasukkan kedalam kurikulum.

Solusi diatas juga sekaligus solusi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara tepat mengenai Koperasi. Selain itu masalah sumber daya manusia yang belum memadai dalam menggali dan memaksimalkan potensi desa bisa diatasi dengan melakukan pendampingan baik yang dilakukan oleh instansi terkait maupun melalui kegiatan KKN (kuliah kerja nyata) perguruan tinggi dengan membekali mahasiswa dengan materi-materi koperasi sekaligus melakukan penggalian potensi yang ada didesa sesuai bidang ilmunya masing-masing. Pemerintah dengan perguruan tinggi bisa bersinergi memadukan program-programnya untuk memberdayakan masyarakat desa.

Banyak terjadi di pedesaan pengelolaan usaha-usaha strategis dan tempat wisata hanya dikelola oleh orang-perorang yang menyebabkan pemerataan kesejahteraan

tidak adil dan merata. Gerakan koperasi memfokuskan diri pada golongan masyarakat yang masih miskin agar menjadi sejahtera, pemangku kepentingan didesa dan organisasi desa harus bahu-membahu untuk bersatu bersama menggali potensi yang dimiliki oleh setiap orang kemudian mendata dan mengelompokkan mereka ke dalam kelompok yang sesuai dengan bidang potensi yang dimiliki agar mudah dilakukan pembinaan dan pengorganisasian sesuai bidang masing-masing. Kelompok-kelompok inilah yang nantinya menjadi embrio pembentukan koperasi yang kemudian dikoordinir oleh para pemangku kepentingan agar bersatu dan terarah untuk mencapai tujuan utama yaitu menjadikan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kreativitas dan ide-ide dari masyarakat perlu dipacu dan dirangsang agar mereka bisa memaksimalkan potensi desa yang dimiliki, sekarang ini banyak desa yang berpacu untuk menjadikan desa mereka sebagai destinasi wisata menarik, setiap daerah berlomba-lomba menjadikan desa mereka sebagai tempat wisata yang menarik minat masyarakat. Selain itu, kemampuan inovasi dan kreatifitas masyarakat perlu diasah melalui pembinaan dan pelatihan oleh dinas terkait agar bisa menemukan dan mengembangkan ide kawasan wisata baru yang memiliki *value* atau nilai lebih dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya, perlu diberikan gambaran-gambaran sebagai umpan agar masyarakat bisa memaksimalkan ide dan kreatifitas mereka.

Faktor sarana dan prasarana yang minim (akses jalan, bangunan, jaringan internet, fasilitas umum) dengan badan usaha koperasi dimana seluruh masyarakat bisa terlibat dan menjadi anggotanya, bisa menjadikan solusi untuk masalah dana ditanggung secara swadaya dan tenaga yang bisa dilakukan secara gotong-royong, sehingga potensi desa bisa segera tergarap dan menghasilkan.

Solusi masalah modal dapat diatasi dengan KUR (kredit usaha rakyat) dengan bunga yang sangat kecil hanya 7% per tahun serta dengan dana bergulir dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UMKM yang bisa diakses secara mudah dan cepat. Banyaknya anggota, semangat kekeluargaan dan gotong-royong, maka modal juga bisa dikumpulkan secara swadaya sehingga masalah permodalan dapat teratasi.

Masalah pesaing dari sesama koperasi maupun dari badan usaha lainnya bisa diatasi dengan koperasi harus mempunyai keunggulan kompetitif (unik) yang belum pernah ada.

Budaya malas, tidak disiplin, menunggu (pasif) dan *negative thinking* dihilangkan dengan selalu memberikan contoh terlebih dahulu oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah yang didukung oleh seluruh komponen yang ada dimasyarakat mulai dari generasi muda, pemangku kepentingan desa, akademisi dan praktisi di bidang koperasi serta media massa.

Teknologi dan informasi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup dan keberlangsungan suatu kegiatan usaha.

Untuk mengembangkan desa wisata sangat dibutuhkan informasi yang *up to date* untuk disampaikan kepada *stakeholder* dan masyarakat luas, sehingga dibutuhkan penguasaan teknologi dan informasi secara komprehensif. Penyebaran informasi melalui sosial media *instagram, facebook, twitter, youtube* saat ini sangat efektif bagi perkembangan dan kelangsungan hidup desa wisata. Melalui sosial media tersebut kita bisa mempromosikan dan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan lengkap tanpa mereka harus datang terlebih dahulu, mereka cukup membuka *website* desa wisata. Untuk mengatasi masalah penguasaan teknologi dan informasi kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan instansi atau dinas terkait, membuka jaringan internet didesa dan menambah hotspot area agar otomatis masyarakat berselancar di dunia maya dan terbiasa menggunakan akses internet.

Tantangan yang dihadapi kementerian Koperasi dan UKM saat ini adalah bagaimana meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap koperasi agar mengerti, memahami dan menjadikan koperasi sebagai tujuan hidup di masa depan melalui pendidikan koperasi sejak dini dengan memasukkan materi koperasi sebagai mata pelajaran khusus dan wajib ditempuh oleh siswa SMA, SMK dan yang sederajat.

KESIMPULAN

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, dapat lebih diberdayakan

dengan modal tekad dan kemauan serta konsistensi dari para pelakunya. Tugas awal utama adalah merubah *mindset*/pola pikir masyarakat tentang koperasi dari hanya untuk memperoleh dana bantuan dan kemudahan pendiriannya, menjadi mendirikan koperasi karena suatu kebutuhan untuk memperkuat dan memajukan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dalam memaksimalkan potensi wisata desa.

SARAN

Membangkitkan kesadaran masyarakat dengan membentuk *mindset* atau pola pikir yang benar tentang koperasi dengan cara Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait (Bagian KeSra) ketika melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi yang akan melakukan Kuliah Kerja Nyata di kabupaten Semarang, mewajibkan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi mengenai Koperasi kepada masyarakat.

Memaksimalkan fungsi dan *update website* Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan agar cakupan sasaran luas dan masyarakat tertarik mudah mendapatkan informasi koperasi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Modal-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ardhyatama Airlangga. 2018. *Tantangan Koperasi Indonesia di Era Globalisasi, Dinas Koperasi dan*

UKM Kaupaten. Semarang.

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga.

Baswir, Revrison, 2000. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE.

Chaniago, Arifinal. 1984. *Perkoperasian Indonesia*, Bandung : Angkasa.

Harjito, Yunus., Cahyo Wibowo, Ambang., Suhardjanto Djoko. 2014. *Telaah Kearifan Lokal terhadap Akuntabilitas Lumbung Desa*. Jurnal JEB. Vol. XVII. No. 1.

Ninik Widiyanti dan Sunindhia. 1998. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta.

Ropke, Jochen. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. 2000. Bandung: Salemba Empat.

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019

Undang-undang No. 25 Tahun 1992

Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014
tentang Desa

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, rev.ed. Bandung: Alfabeta.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017>

<http://jateng.tribunnews.com/2018>

<http://m.bisnis.com/industri/read/2018>

Surat Kabar Harian ***Suara Merdeka***
terbitan bulan agustus s/d
desember2018

Ditjen Pariwisata. 1999. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta.

